



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIN)



BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN YOGYAKARTA



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN YOGYAKARTA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIN)

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN YOGYAKARTA

Penyusun :

Dr. Ahmad Yunan Arifin, S.Pt., M.Si.

Eko Srihartanto, SP., M.Sc.

Agung Iswadi, S.Si., M.Sc.

Utomo Bimo Bekti, SP.

Eko Sutardi, SE.

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN YOGYAKARTA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2025

KATA PENGANTAR



Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) D.I. Yogyakarta mempunyai Tugas “Melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian”. BRMP D.I.Yogyakarta mempunyai sasaran kinerja: 1) Meningkatkan penerapan Modernisasi pertanian dengan indikator tujuan : a) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan b) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian;

2) Meningkatkan produksi instrumen pertanian standar dengan indikator tujuan jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan; 3) Terwujudnya reformasi birokrasi BRMP D.I.Yogyakarta yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator nilai pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM BRMP D.I.Yogyakarta, dan 4) Terkelolanya anggaran BRMP D.I.Yogyakarta yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator nilai kinerja anggaran BRMP D.I.Yogyakarta.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) TA 2025 merupakan pertanggungjawaban hasil kinerja instansi BRMP D.I. Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan tupoksinya. LAKIN ini berupa rangkuman dari seluruh kegiatan yang dilakukan baik fisik maupun keuangan selama TA 2025 yang diformulasikan dalam bentuk Perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja baik capaian kinerja organisasi maupun realisasi anggaran.

Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN). Namun demikian kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, oleh karena itu sumbang saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Yogyakarta, Desember 2025
Kepala Balai,

Plt. Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si.
NIP. 19710927 199803 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian sesuai PERMENTAN No 10 Tahun 2025. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I.Yogyakarta menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; pelaksanaan pengujian, diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi serta model pertanian modern; pelaksanaan produksi benih/bibit sumber dan penilaian kesesuaian; pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian; pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan standar nasional Indonesia; pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerpaan hasil perakitan dan perekaysaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Pembangunan pertanian nasional memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakpastian pasar, degradasi sumber daya alam, serta dinamika geopolitik menuntut adanya perencanaan pembangunan pertanian yang adaptif, terarah, dan berkelanjutan. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut serta mendukung pencapaian visi pembangunan nasional, Kementerian Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 (Renstra Kementan 2025–2029). Renstra ini menjadi dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja Kementerian Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 merupakan dokumen fundamental dalam mengarahkan pembangunan pertanian nasional selama lima tahun ke depan. Penjabaran Renstra ini memberikan kerangka strategis yang jelas bagi penyusunan dan pelaporan kinerja tahun 2025 Melalui keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja, diharapkan pembangunan pertanian dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia.

Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025. Seluruh target kinerja tahunan harus selaras dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian yang difokuskan pada:

1. Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri.
2. Pengembangan pertanian modern berbasis teknologi, mekanisasi, dan digitalisasi.
3. Peningkatan efisiensi dan keberlanjutan prasarana dan sarana pertanian.
4. Penguatan kelembagaan petani dan sistem pembiayaan pertanian.
5. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian.

Strategi pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui program prioritas, sinergi lintas sektor, serta penguatan peran pemerintah pusat dan daerah.

Pembuatan LAKIN BRMP Yogyakarta tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan kegiatan BRMP Yogyakarta berdasarkan pada Rencana Operasional BRMP Yogyakarta selama kurun waktu satu tahun. LAKIN TA 2025 ini merupakan pertanggungjawaban hasil kinerja instansi dalam rangka melaksanakan tupoksinya. LAKIN ini berupa rangkuman dari seluruh kegiatan yang dilakukan BRMP Yogyakarta baik fisik maupun keuangan selama TA 2024. Laporan kinerja tahun 2025 berfungsi untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja tahun pertama Renstra; mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan pertanian dan dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya. Keterkaitan antara Renstra, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahun 2025 telah dihasilkan adalah (1) Meningkatnya pelaku usahatani yang menerapkan standar pertanian (1 SNI/ 1 lembaga usahatani); (2) Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan adaptif (0 unit tidak ada anggaran kegiatan di tahun 2025); (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, berupa memperoleh Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta (nilai 84,91); (4) Terkelolanya anggaran BRMP Yogyakarta yang akuntabel dan berkualitas, berupa memperoleh Nilai Kinerja Anggaran Balai Modernisasi Pertanian Yogyakarta dengan Nilai 98,72 (Kategori Sangat Baik).

Anggaran Satker BRMP Yogyakarta dicairkan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA BRMP Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 oleh Menteri Keuangan Nomor : SP DIPA–018.09.2.633975/2025, tanggal 2 Desember 2024. Terdapat 2 skenario DIPA blokir dan tanpa blokir.

Pada DIPA blokir, Pagu DIPA sebesar Rp 11.615.149.000,- dana yang terserap sebesar Rp. 10.992.930.692 atau 94,64%, sedangkan sisa anggaran Blokir sebesar Rp. 568.500.000 atau 4,89% dan sisa anggaran tidak terserap Rp 53.718.308,- atau 0,46% (Anggaran tersebut masih di blokir tahun 2025 meliputi Dukungan manajemen – Kegiatan LTT). Alokasi anggaran BRMP Yogyakarta berdasarkan jenis belanja (menurut DIPA tahun 2025) terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang (Barang operasional dan non operasional). Berdasarkan proporsinya, maka anggaran belanja yang paling besar dari total anggaran adalah belanja pegawai yaitu sebesar Rp 6.656.022.000-

(57,30%) dengan realisasi Rp. 6.614.331.688 (99,37%), kemudian terdapat belanja barang operasional Rp 4.808.140.000 (41,39%) dengan rincian belanja barang operasional sebesar Rp 3.213.738.000,- (27,66%) dan belanja barang non operasional sebesar Rp. 1.594.402.000,- (13,72%). Kemudian belanja modal sebesar 150.987.000, - (1,29%).

Sedangkan jika menggunakan DIPA tanpa blokir, Pagu DIPA sebesar Rp 11.046.649.000,- dana yang terserap sebesar Rp. 10.992.930.692,- atau 99,51%, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 53.718.308,- atau 0,48% (anggaran tersebut asumsi sudah blokir tahun 2025 meliputi dukungan majamenen – kegiatan LTT). Alokasi anggaran BRMP Yogyakarta berdasarkan jenis belanja (menurut DIPA tahun 2025) terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang (barang operasional dan non operasional). Berdasarkan proporsinya, maka anggaran belanja yang paling besar dari total anggaran adalah belanja Pegawai yaitu sebesar Rp 6.656.022.000- (57,30%) dengan realisasi Rp. 6.614.331.688 (99,37%), kemudian terdapat belanja barang operasional Rp 4.239.640.000,- (38,37%) dengan rincian belanja barang operasional sebesar Rp.2.645.238.000,- (23,94 %) dan belanja barang non operasional sebesar Rp. 1.594.402.000,- (14,43%). Kemudian belanja modal sebesar 150.987.000, - (1,36%).

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Realisasi keuangan Satker BRMP Yogyakarta atas dasar SP2D sampai dengan akhir TA. 2025 mencapai Rp 10.992.930.692,- atau 99,51%, dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2025. Realisasi anggaran terendah pada belanja barang non operasional sebesar Rp 4.220.387.544 (87,78%). Realisasi anggaran tertinggi pada belanja pegawai yaitu sebesar Rp 6.614.331.688 (99,37%).

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah keterbatasan kompetensi SDM Standardisasi laboratorium, SDM teknisi lapangan, dan administrasi ditinjau dari segi keilmuan dan jumlahnya, serta keterbatasan sarana dan prasarana UPBS, laboratorium tanah dan air dan Laboratorium Diseminasi Agrostandar.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah : 1) Mengoptimalkan SDM yang ada dan meningkatkan kapasitas SDM melalui training jangka pendek dan panjang, 2) Melakukan perbaikan rencana kegiatan dan RKA-KL, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, serta penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1. Perencanaan Strategis	6
2.2. Perencanaan Kinerja.....	8
2.3. Perjanjian Kinerja.....	9
BAB III. Akuntabilitas Kinerja.....	11
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	11
3.2 Realisasi Anggaran (Akuntabilitas keuangan).....	31
BAB IV. PENUTUP	35
LAMPIRAN:.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran, Sub Kegiatan, Indikator kinerja dan target Pencapaian Tahun 2023 -2025	10
Tabel 2.	Rincian Tingkat Capaian Kinerja masing-masing indikator Kinerja 2025-2029.	12
Tabel 3.	Jumlah standar instrument pertanian yang didiseminasikan (SNI).....	14
Tabel 4.	Rincian Nilai komponen Kinerja Anggaran BRMP Yogyakarta TA 2025	18
Tabel 5.	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 sampai 2025.....	20
Tabel 6.	Capaian Kinerja lainnya tahun 2025.....	21
Tabel 7.	Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Belanja TA. 2025.....	32
Tabel 8.	Efisiensi Penggunaan sumberdaya Standar Biaya kegiatan (SBK) TA 2025	33
Tabel 9.	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 2025	34
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Pendapatan 2024 dan 2025.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Operasional Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian.....	4
-----------	--	---

BAB I. PENDAHULUAN

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) adalah salah satu unit kerja eselon 1 Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pembentukan BRMP ini merupakan hasil transformasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang sebelumnya juga merupakan kelanjutan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) hadir menjadi tonggak penting dalam reformasi kelembagaan sektor pertanian yang mengedepankan inovasi dan modernisasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertanian, yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pertanian, serta Permentan Nomor 10 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur OTK Unit Pelaksana Teknis BRMP.

Dengan mandat strategis di bidang perekayasaan, perakitan, pengujian, penyebarluasan, dan penerapan pertanian modern, BRMP hadir sebagai motor penggerak dalam transformasi pertanian nasional menuju sistem yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Sebagai institusi yang memikul tanggung jawab besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pangan dan pertanian nasional, BRMP tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga memainkan peran sebagai fasilitator perubahan di lapangan.

R E N S T R A B R M P 2 0 2 5 -2029 5 Keberadaan BRMP menjadi bagian dari proses pembelajaran kelembagaan (learning process) yang dinamis, menuju posisi sebagai lembaga terdepan dan pusat rujukan dalam pengembangan serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi teknologi. Kiprah BRMP dibangun di atas fondasi pengalaman panjang dari lembaga-lembaga pendahulunya, yang telah meletakkan dasar kuat dalam perekayasaan pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta sesuai PERMENTAN No 10 Tahun 2025 mempunyai tugas Melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Adapun fungsi BRMP Yogyakarta adalah sebagai berikut : Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; pelaksanaan pengujian, diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi serta model pertanian modern; pelaksanaan produksi benih/bibit sumber dan penilaian kesesuaian; pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian; pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan standar nasional Indonesia; pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerpaan hasil perakitan dan perekaysaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil

perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Yogyakarta merupakan Eselon III di lingkungan Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Dalam tata hubungan kerjanya, BRMP Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki struktur organisasi dengan dukungan 4 Pusat perakitan dan modernisasi (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan) dan 9 Balai Besar Komoditas yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kelompok fungsional lingkup BRMP yaitu: Analis Standardisasi, Penyuluh Pertanian, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT), Pengawas Mutu Hasil Perhatian (PMHP), Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Analis Sarana dan Prasarana Pertanian, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, serta kelompok fungsional lainnya yang mendukung kegiatan pada UK dan UPT (Perencana, Pranata Komputer, Analis Kerja Sama, Pranata Humas, dan lain-lain).

Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) yang semula disebut sebagai Kebun Percobaan merupakan salah satu sarana yang dimiliki BRMP Yogyakarta untuk mendukung pengembangan dan diseminasi teknologi spesifik lokasi. Fungsi IP2MP antara lain digunakan sebagai lokasi untuk : (1) penelitian dan pengkajian (litkaji) teknologi, (2) konservasi ex – Situ koleksi plasma nutfah, (3) pengelolaan dan perbanyakan benih sumber, (4) kebun produksi, dan (5) peragaan (*show window*) keunggulan teknologi hasil litkaji seperti visitor plot dan proses pengelolaan produk komoditas, dan (6) agrowidyawisata. IP2MP terletak di Nganyang, Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 4 Ha. Penggunaan IP2MP untuk kegiatan UPBS memberikan hasil PNBP yang cukup signifikan karena produksi benih seluruhnya menjadi milik BRMP Yogyakarta yang siap dijual dan didistribusikan kepada petani penangkar dan pengguna.

Laboratorium BRMP Yogyakarta dilengkapi dengan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu laboratorium Tanah. Laboratorium tanah memiliki fungsi dalam melaksanakan analisis kimia, analisis fisika, analisis mikro, analisis tanaman dan pupuk. Laboratorium Tanah di BRMP Yogyakarta juga menyediakan jasa bagi pihak luar yang memerlukan hasil analisis laboratorium. Jasa yang disediakan oleh laboratorium antara lain pemeriksaan tanah kimia, fisika, air dan pupuk.

Wilayah kerja BRMP Yogyakarta mencakup 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul dan 1 Kota yaitu Kota Yogyakarta. Dalam mendukung pencapaian kinerja BRMP, kegiatan utama penerapan

Modernisasi Pertanian merupakan implementasi hasil koordinasi dengan stakeholder terkait kebutuhan teknologi di daerah.

Dalam kerjanya Kepala BRMP D.I.Yogyakarta dibantu oleh Ketua Tim kerja Program dan evaluasi, Kasubbag tata Usaha dan ketua Tim kerja Layanan Penerapan Modernisasi Pertanian. Ketua tim kerja proram dan evaluasi dibantu oleh kelompok perencanaan dan penganggaran, kelompok monitoring dan evaluasi serta kelompok data dan informasi/ PPID. Dalam tugasnya Kasubbag Tata Usaha daam kerjanya dibantu oleh urusan Keuangan, kepegawaian, Sekretariat dan Rumah tangga serta urusan pengelolaan BMN. Sedangkan Tim kerja layanan penerapan dan modernisasi pertanian dibantu oleh kelompok penerapan Modernisasi Pertanian, kelompok Diseminasi Modernisasi Pertanian, kelompok model penerapan dan pengujian standar SIP/ IP2MP, materi diseminasi/ Pameran, layanan pengujian SIP, serta kelompok pengelolaan produk SIP. (Gambar 1).

STRUKTUR ORGANISASI
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I. YOGYAKARTA



Gambar 1. Struktur Organisasi Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, BRMP telah menunjukkan kiprah nyata dalam menghasilkan modernisasi pertanian untuk menjawab kebutuhan pengguna. Tidak hanya model-model inovasi teknologi dan pengembangan kelembagaan, namun juga strategi kebijakan dan penyusunan panduan operasional berbagai kegiatan.

Pembuatan LAKIN BRMP Yogyakarta tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan kegiatan BRMP Yogyakarta selama kurun waktu satu tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) TA 2025 merupakan pertanggungjawaban hasil kinerja instansi BRMP Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan tupoksinya. LAKIN ini berupa rangkuman dari seluruh kegiatan yang dilakukan BRMP Yogyakarta baik fisik maupun keuangan selama TA 2025 yang diformulasikan dalam bentuk Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Yogyakarta merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari BBRMP (Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian), yang secara hirarkis merupakan functional Unit BRMP (Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian). Berdasarkan hierarchical strategic plan, maka BRMP menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program BRMP, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BRMP/UPT dituangkan menjadi Rencana Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategis, dan program BRMP 2025-2029 mengacu pada visi dan misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategis, dan program seluruh satuan kerja BRMP, termasuk BBRMP dan BRMP. Berdasarkan hierarchical strategic plan dan Rencana Aksi BRMP, maka visi dan misi BRMP Yogyakarta adalah:

A. Visi dan Misi

Visi

Dalam upaya mendukung visi BRMP 2025 – 2029, BRMP Yogyakarta mempunyai visi yaitu: *"Menjadi Lembaga Unggulan dalam Penerapan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif untuk Mendukung Pertanian Maju Berkelanjutan"*.

Misi

Misi BRMP Yogyakarta, mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Melaksanakan perekayasaan dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Melaksanakan penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian;
3. Mengembangkan metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi
4. Mengembangkan model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
5. Melaksanakan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta sesuai PERMENTAN No 10 Tahun 2025 mempunyai tugas Melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Adapun fungsi BRMP Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian;
2. pelaksanaan pengujian, diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi serta model pertanian modern;
3. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber dan penilaian kesesuaian; pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
4. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan standar nasional Indonesia;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerpaan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Berdasarkan Renstra 2025, BRMP D.I.Yogyakarta Tahun 2025 memiliki Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian
 - a. Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (jumlah usahatani)
2. Tersedia Teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif:
 - a. Jumlah Produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif efisien dan berorientasi pada layanan prima , indikator tujuan ini yaitu :
 - a. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta (Nilai)
4. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Yang akuntabel dan berkualitas, indicator kinerja :
 - a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta (Nilai).

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

Sasaran Program Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mendukung pencapaian 4 Sasaran Program BRMP yaitu 1). Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian dengan indikator kinerja utama: Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian; 2). Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif dengan indikator kinerja utama: Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif; 3). Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja utama: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian; 4). Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja utama: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

2.2. Perencanaan Kinerja

Sejalan dengan mekanisme perencanaan seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana kerja (Renja) tahunan. Renja merupakan rencana kerja tahunan di tingkat kementerian atau lembaga yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara RKP merupakan rencana kerja pemerintah tahunan (annual plan) yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Kementerian jangka menengah (RPJM Kementerian), yang terdokumentasikan dalam Renstra. Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA- KL) pada tahun 2025, lingkup BRMP Yogyakarta mengimplementasikan Kegiatan Prioritas penerapan standarisasi instrument pertanian melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja, yang berdasarkan RKA-KL dan POK (Petunjuk Operasional Kinerja) lingkup BRMP Yogyakarta Tahun 2025, telah disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025.

Penyusunan Rencana kinerja kegiatan tersebut diselaraskan dengan sasaran Renstra BRMP Yogyakarta 2025 – 2029. Rencana Kinerja tersebut memuat Sasaran strategis kegiatan yang akan dilaksanakan; Indikator Kinerja berupa hasil yang akan dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel; serta target yang akan dihasilkan. Selanjutnya RKT yang telah disusun ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja (PK) guna mendorong pengembangan menuju Good Governance

2.3. Perjanjian Kinerja

Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (bottom up) serta program di level pusat (top down), maka umpan balik (feedback) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi program/kegiatan di BRMP Yogyakarta disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika yang ada serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan demikian, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi kontrak Kinerja BRMP Yogyakarta untuk Tahun 2024 melalui Penetapan Kinerja Tahunan, yang merupakan wujud komitmen perjanjian kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BRMP Yogyakarta.

Mengacu pada kebijakan umum Modernisasi pertanian yang telah dirumuskan dalam Renstra, maka BRMP Yogyakarta menetapkan pencapaian tujuan dan sasaran pengkajian teknologi pertanian sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelaku usahatani yang menerapkan standar pertanian.
2. Tersedia Teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif.
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif efisien dan berorientasi pada layanan prima
4. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsinya, dari program utama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian serta Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, maka BRMP Yogyakarta dalam kurun waktu 2025 – 2029 menetapkan sasaran, sub kegiatan, indikator kinerja, dan target pencapaiannya (Tabel 1). Dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Yogyakarta yang telah ditetapkan pada Bulan Januari 2025, yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan, karena adanya revisi DIPA dan perubahan pimpinan (Terlampir)

Tabel 1. Sasaran, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Tahun 2023 – 2025 BRMP Yogyakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Outcome/ Indikator Kegiatan	Target		
			2023	2024	2025
1	Meningkatnya Pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah usahatani)	1	1	1
		2.Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar dan modernisasi Pertanian (Lembaga)	1	1	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlah Produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	4.030	35	0
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta (Nilai)	82	83	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta (Nilai)	85	86	85

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Program Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mendukung pencapaian 4 Sasaran Program BRMP yaitu 1). Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian dengan indikator kinerja utama: Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian; 2). Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif dengan indikator kinerja utama: Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif; 3). Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja utama: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian; 4). Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja utama: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian. Realisasi sampai akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 4 sasaran yang direncanakan telah dapat dicapai dengan hasil Sangat baik.

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas,
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif,
3. Harus relevan,
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak,
5. Harus fleksibel dan sensitif dan
6. Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan
2. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel 2.

Dilihat dari hasil tabel indikator kinerja, kinerja BRMP Yogyakarta tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025 **Tabel 2.**

Tabel 2 . Rincian Tingkat Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya Pelaku Usahatani Yang Menerapkan Standar Pertanian	Jumlah Usahatani yang mendapatkan Pendampingan penerapan standar Pertanian (jumlah usahatani)	1	1	100
2	Tersedianya Teknologi hasil Perekrayaan dan Perakitan yang Adaptif	Jumlah Produksi benih/bibit Sumber Spesifik Lokasi (Unit)	0	0	0
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta (Nilai)	80	84,91	102,30
4.	Terkelolanya Anggaran Badan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pengguna Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Perakitan Pertanian Yogyakarta (Nilai)	85	98,72	116,14

Keterangan :

*: Data Tanggal 31 Desember 2025.

Pada tahun 2025 realisasi pada setiap kinerja mencapai target yang diharapkan. Sasaran Pengelolaan Modernisasi Pertanian terkait kegiatan standar instrument pertanian yang didiseminasikan mencapai output 100%, sedangkan jumlah lembaga penerap standar tercapai 100%. Produksi Modernisasi Pertanian Terstandar tidak mendapatkan anggaran kegiatan sehingga tidak dilakukan proses kegiatan (0 unit), Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima mencapai 102,30% sedangkan pengelolaan anggaran Nilai Indikator Kinerja anggaran BRMP Yogyakarta mencapai 116,14 %.

A. Analisis Capaian Kinerja 2025.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 Tabel indikator kinerja, kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Meningkatnya Pelaku Usahatani yang menerapkan Standar Pertanian
--------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan dua indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)	1	1	100

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2025 telah tercapai atau terealisasi 1 SNI (100%) / 1 lembaga penerap standar usahatani (100%). Sasaran indikator tercapai melalui 1 (satu) kegiatan utama, yaitu: (1) Meningkatnya Meningkatnya Pelaku Usahatani yang menerapkan Standar Pertanian. Indikator kinerja sasarannya adalah Jumlah usahatani yang mebdapatkan pendampingan standar pertanian (1 Usahatani) Rincian output yang telah dicapai dari kegiatan ini diuraikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Usahatani
1	Budidaya dan pengolahan Gula Kelapa Organik SNI no.6729-2016	KUB Nira Lestari Golden Dusun Gunung Kukusan, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap

Kegiatan pendampingan penerapan SIP dititik beratkan pada upaya penerapan dan penilaian kesesuaian yang digerakkan oleh kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha untuk memfasilitasi kesesuaian produknya dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Kegiatan pendampingan umumnya digunakan sebagai suatu strategi oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2025 ini kegiatan pendampingan yang dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan Desember terbagi 2 yaitu pendampingan kegiatan tahun 2024 dan kegiatan baru yang dimulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2025.

Kegiatan pendampingan kegiatan tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025 ini merupakan kegiatan monitoring ke Lembaga penerap apakah kegiatan penerapan SNI masih komitmen dilaksanakan atau tidak. Sedangkan kegiatan pendampingan Lembaga penerap SNI yang baru adalah kegiatan pendampingan Bersama sama Dinas Pertanian Provinsi dan Direktorat Perkebunan dalam kegiatan sertifikasi gula kelapa organik. Metode pendampingan yang dilaksanakan pada tahun 2025 ini adalah pendampingan lapangan kepada kelompok penerap SNI bina UMK ataupun SNI gula kelapa organik tanpa memberikan bantuan sarana/bahan pendampingan.

Pada bulan Desember ini bersama ICERT melaksanakan inspeksi lapangan. ICERT (ICERT terakreditasi ISO 17065:2012 oleh [Komite Akreditasi Nasional \[KAN\]](#) sebagai lembaga sertifikasi produk [LSPR-095-IDN] dengan lingkup sertifikasi organik untuk tanaman dan produk tanaman, ternak dan produk peternakan, produk liar, pengolahan produk asal tanaman, ternak dan produk liar, dan input organik). Kegiatan pendampingan diutamakan untuk mempersiapkan anggota kelompok tani agar semangat mengumpulkan dokumen, mencatat kegiatan sesuai SOP sehingga terpenuhi syarat untuk dilakukan sertifikasi.

Beberapa temuan mayor di dokumen administrasi, Tim asesor ICERT memberikan waktu tenggang satu bulan dalam rangka perbaikan dokumen, pada saat dilakukan closing ditemukan berbagai temuan seperti kekurangan standar operasional; prosedur (SOP). Dalam perbaikan didampingi oleh penyuluh lapangan dari BPP Kokap, dan BRMP DIY. Adapun untuk sampel gula kelapa organik sudah dikirimkan ke laboratorium pengujian. Pada tanggal 21 November 2025 sudah dilakukan perbaikan dokumen mengenai SOP untuk proses pembuatan gula kelapa organik dan sudah dikirimkan Kembali perbaikan dokumen tersebut ke Tim asesor ICERT.

Pada akhir tahun ini tim pendampingan Lembaga penerap telah melaksanakan kegiatan monitoring kelompok Lembaga penerap binaan BRMP DIY tahun 2024 serta melaksanakan pendampingan Bersama sama pemerintah daerah ke 2 (dua) kelompok Lembaga penerap gula kelapa organik di Kabupaten Kulonprogo.

DOKUMENTASI



Sasaran 2 : Meningkatnya Teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Produksi Benih/Bibit sumber spesifik lokasi	0	0	0

Tahun 2025 BRMP D.I. Yogyakarta tidak mendapatkan kegiatan dan anggaran produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi, sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan.

Sasaran 3 :

Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta (Nilai)	80	84,91	102,30

Indikator kinerja sasaran yang diwujudkan dalam Nilai Kinerja anggaran BRMP Yogyakarta (berdasarkan regulasi yang berlaku) tahun 2025 dapat dicapai sebesar 102,30 % (84,91). Nilai ini merupakan bentuk akumulasi realisasi penggunaan fisik dan anggaran kegiatan BRMP Yogyakarta tahun 2025.

Sasaran 4 :	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indicator kinerja pelaksana Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku)	85	98,72	116,14

Nilai Kinerja anggaran diwujudkan dalam indikator kinerja penggunaan anggaran (IKPA) yang tertuang pada aplikasi SMART DJA kementerian Keuangan TA 2025 terdiri dari beberapa komponen (Nilai) tertera pada **Tabel 4:**

Tabel 4. Rincian Nilai komponen Kinerja Anggaran BRMP Yogyakarta TA 2025

No	Komponen Penilaian	Jumlah Nilai Aspek
1.	Kualitas perencanaan anggaran (Revisi DIPA 100, Deviasi Halaman III DIPA 91,48)	100
2.	Kualitas pelaksanaan Anggaran (Penyerapan Anggaran 100, Belanja Kontraktual 100, penyelesaian tagihan 100, pengelolaan UP dan TUP 100)	100
3.	Kualitas Hasil pelaksanaan Anggaran (Capaian Output 100)	100
	Total Nilai	98,72

Dukungan program nilai tambah dan daya saing industri Pengelolaan standar Modernisasi pertanian, yaitu 1) penerapan standard an Modernisasi produk, 2) Sosialisasi dan diseminasi, 3) Fasiltasi dan pembinaan lembaga, 4) Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan, 4) Layanan perkantoran 5) layanan umum, 6) layanan BMN, 7 Layanan manajemen SDM, 8) Layanan perencanaan dan penganggaran, 9) Layanan pemantauan dan evaluasi, 10) Layanan manajemen Keuangan.

Dari keseluruhan target sasaran BRMP Yogyakarta tahun 2025, dapat terealisasi 100% dan diatas 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2025 tersebut di atas antara lain disebabkan oleh:

1. Kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu;
2. Intensifnya kegiatan pertemuan dan koordinasinya masing-masing tim dan penanggungjawab;
3. Kontribusi substansi teknis dari para narasumber dalam forum seminar proposal dan pertemuan lainnya.
4. Monev yang ketat di lapangan kegiatan pelaksanaan
5. Modal yang dialokasikan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja 2023 - 2025

Dukungan BRMP terhadap target empat sukses Kementerian Pertanian ditunjukkan dalam sasaran strategis, yang diantaranya berkaitan langsung dengan Tupoksi BRMP Yogyakarta, yakni menerapkan modernisasi dan standar pertanian, serta mendukung program nilai tambah dan daya saing industri.

Perkembangan terkini yang sangat berpengaruh terhadap kinerja dan peran BRMP dalam pembangunan pertanian daerah adalah semakin meningkatnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kemajuan pembangunan pertanian di wilayah masing-masing seiring dengan program otonomi dan pemekaran daerah. BRMP sebagai penghasil standardisasi instrument pertanian secara nyata telah banyak diakui keunggulannya. Hal ini memberi peluang bagi upaya peningkatan peran dan kerjasama standardisasi instrument pertanian yang makin intensif dengan pemda dan stakeholder lain yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja BRMP Yogyakarta, kegiatan utama Standardisasi instrument pertanian seluruh BRMP Yogyakarta merupakan implemetasi hasil koordinasi dengan stakeholder terkait kebutuhan teknologi di daerah.

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh Kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu; Intensifnya kegiatan pertemuan dan koordinasinya masing-masing tim dan penanggungjawab; dan Kontribusi substansi teknis dari para narasumber dalam forum seminar proposal dan pertemuan lainnya.

Tabel 5. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dan 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian		
			2023	2024	2025
1.	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	2	1	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	
2	Tersedianya Teknologi Hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif.	Jumlah Produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit) (Tidak ada anggaran kegiatan TA 2025)	9.406	29,4	-
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta (Nilai)	82,17	83,88	84,91
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan an Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta (Nilai)	85,48	96,55	98,72

C. Capaian Outcome (Kegiatan Tahun 2025)

Pada tahun 2025 telah dihasilkan adalah (1) Meningkatnya pelaku usaha yang menerapkan standar pertanian pertanian berupa 1 usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian; (2) Tersedianya Teknologi Hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif ; (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, berupa memperoleh Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta 84,91; (4) Terkelolanya anggaran BRMP yang akuntabel dan berkualitas, berupa memperoleh nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta 98,72 (Kategori Sangat Baik).

D. Capaian Kinerja Lainnya Tahun 2025.

Indikator kinerja sasaran lainnya telah melampaui yang ditargetkan dalam Tahun 2025, dimana telah tercapai atau terealisasi 6 SNI (target 1 SNI) dan 4 lembaga (target 1 lembaga penerap standar). Rincian output yang telah dicapai dari kinerja kegiatan lainnya ini diuraikan pada **Tabel 6.**

Tabel 6. Capaian kinerja lainnya tahun 2025

No	Jenis kegiatan	Jumlah SNI/ lembaga
1.	SNI 4480:2016 dan SOP budidaya cabai	1 SNI
2.	Budidaya tomat sesuai SNI 01-3162-1992.	1 SNI
3.	SNI 7783:2013 tentang mutu melon	1 SNI
4	SNI 9177:2023 Pengelolaan Bank Gen Lapang	1 SNI
5	SNI 9254:2024 Pengelolaan Bank Gen benih ortodok	1 SNI
Total		5 SNI

1. Diseminasi SNI 4480:2016 dan SOP budidaya cabai

Teknologi pengelolaan air yang dapat dilakukan untuk adaptasi dan mitigasi yang dapat diterapkan oleh petani komoditas cabai dapat dilaksanakan dengan irigasi tetes maupun irigasi kapiler. Penggunaan irigasi tetes dapat menekan penggunaan air yang terbatas karena lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan mulsa jerami juga dapat dilaksanakan untuk menambah bahan organik dan mengurangi tingkat penguapan pada lahan pertanian. Selain itu penggunaan varietas tahan dan adaptif juga dapat dilaksanakan.



2. Diseminasi prosedur operasional standar terkait budidaya tomat sesuai SNI 01-3162-1992.

Untuk peningkatan produksi dan mutu produksi buah tomat yang dibudidayakan di lapangan, diperlukan penanganan khusus meliputi perbaikan manajemen dan aplikasi budidaya pra-panen dan pasca panen. Untuk mencapai hasil buah yang optimal selain dengan menggunakan varietas yang tahan terhadap penyakit dan hama juga perlu diperhatikan teknologi budidaya yang tepat. Diseminasi SOP ini meliputi Penyediaan bibit sehat, Persiapan lahan optimal, Penanaman dengan jarak tanam optimum, Pemasangan ajir yang sesuai, pengikatan tomat menghindari roboh dengan tali, pengairan sesuai kebutuhan tanaman, penyiangan, pemupukan berimbang dan pemberian hara sesuai kebutuhan tanaman, pengendalian OPT sesuai dosis,



3. Diseminasi SNI 7783:2013 tentang mutu melon dan SOP budidaya melon golden dan SOP budidaya melon dengan Net.

Persiapan tanam yang dilaksanakan pada screenhouse antara lain sanitasi. Sanitasi dilakukan secara manual yang meliputi pembersihan lantai, dinding screen, benang, dan atap. Persiapan media tanam meliputi kegiatan pembuatan media tabulampot dan kegiatan penataan media. Pembuatan media tanam tabulampot terdiri dari tanah, pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 1: 1: 1. Untuk mencegah infeksi jamur dan bakteri media diberi perlakuan dengan penyemprotan fungisida dan kemudian media diperam sebelum dimasukkan ke dalam polybag. Varietas yang akan ditanam adalah melon golden varietas alisa.

Untuk mendapatkan mutu hasil sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perawatan melon perlu dilakukan sejak dari lahan hingga handling. Salah satu permasalahan budidaya melon di screen house BRMP DI Yogyakarta adalah hama tikus. Sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan sebelum buah menjadi rusak. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain memasang perangkat dan memasang jaring (brongsong) pada tanaman melon.

Terdapat ketentuan terkait penampilan yaitu keseragaman dan pengemasan. Keseragaman menitikberatkan pada isi kemasan melon harus seragam dan berasal dari Kawasan tanam, kelas mutu, dan ukuran yang sama. Melon harus dikemas dengan cara yang dapat melindungi buah dengan baik. Bahan yang digunakan dalam kemasan harus bersih dan memiliki mutu yang baik untuk mencegah kerusakan internal maupun eksternal buah. Kemasan harus memenuhi syarat mutu, higienis, ventilasi dan ketahanan untuk menjamin kesesuaian penanganan dan pengiriman untuk mempertahankan mutu.



4. Kegiatan Pengelolaan Kebun Sumberdaya Genetik Berbasis Penerapan SNI BRMP D.I. Yogyakarta.

A. Penataan Ulang Kebun Sumberdaya Genetik di BRMP DIY

Penataan ulang kebun sumber daya genetik (SDG) di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP DIY) merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mutu pengelolaan koleksi sumber daya genetik tanaman. Penataan ulang ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi ulang koleksi, evaluasi kondisi kebun, serta upaya penyesuaian pengelolaan kebun SDG dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kebijakan teknis yang berlaku.



B. Inventarisasi ulang tanaman-tanaman koleksi kebun sumberdaya genetik BRMP DIY

Inventarisasi ulang koleksi kebun sumber daya genetik (SDG) di Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (BRMP DIY) merupakan kegiatan strategis yang bertujuan untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan keterkinian data sumber daya genetik tanaman yang dikelola. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan pengelolaan kebun SDG yang tertib, terdokumentasi, dan selaras dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Inventarisasi ulang dilakukan melalui penelusuran dan verifikasi seluruh koleksi SDG yang terdapat di kebun, meliputi identitas aksesori, kondisi tanaman, status keberadaan, serta kesesuaian antara data lapang dengan data administrasi yang tercatat sebelumnya. Proses ini mencakup pencatatan ulang nomor aksesori, nama lokal atau varietas, asal bahan tanam, metode perbanyakan, serta lokasi penanaman di dalam kebun. Selain itu, dilakukan pengecekan kondisi fisik tanaman untuk mengetahui tingkat kelangsungan hidup, kesehatan tanaman, dan potensi pengembangan lebih lanjut.

Pelaksanaan inventarisasi ulang koleksi SDG di BRMP DIY juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya perubahan atau permasalahan yang terjadi selama periode pengelolaan, seperti kehilangan aksesori, kerusakan tanaman, duplikasi koleksi, maupun ketidaksesuaian data. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi dasar penting dalam pengendalian mutu pengelolaan kebun SDG, khususnya dalam menjamin ketertelusuran (traceability) dan kemurnian sumber daya genetik yang dikelola.

Hasil inventarisasi ulang selanjutnya digunakan untuk memperbarui basis data koleksi kebun SDG BRMP DIY, baik dalam bentuk buku induk kebun maupun sistem data digital. Data yang telah diverifikasi menjadi rujukan utama dalam kegiatan konservasi lanjutan, karakterisasi, pemuliaan, serta penyediaan bahan tanam bermutu. Selain itu, data inventarisasi ulang menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan kinerja kebun SDG, pelaksanaan audit internal, serta evaluasi kesesuaian penerapan SNI. Melalui kegiatan inventarisasi ulang koleksi kebun SDG, BRMP DIY diharapkan mampu memperkuat fungsi kebun sebagai pusat konservasi sumber daya genetik yang andal, akuntabel, dan berkelanjutan. Kegiatan ini sekaligus mendukung peningkatan kualitas pengelolaan kebun SDG secara berkelanjutan serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya genetik tanaman dilakukan secara terencana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Berikut beberapa aksesori tanaman yang masih terpelihara di kebun SDG BRMP DIY.



Nyamplung



Nam-nam



Kelapa



Srikaya Jumbo



Srikaya



Alpukat



Kepel



Manggis



Jambu Citra



Kelengkeng
Diamond River



Anggur
Satriya Tamansari



Sukun

C. Budidaya Kedelai Biosoy 2

Monitoring pertumbuhan awal (daya tumbuh dan vigor bibit) berfungsi menguji kualitas benih di lapangan. Benih yang memenuhi SNI seharusnya menunjukkan tingkat perkecambahan dan pertumbuhan awal yang tinggi dan seragam. Ketidakseragaman atau pertumbuhan yang lemah yang terdeteksi melalui monitoring bisa mengindikasikan kegagalan benih dalam memenuhi standar SNI mutu genetik atau fisiologis.



Fungsi pemeliharaan tanaman kedelai adalah untuk menjaga pertumbuhan tanaman agar optimal dan menghasilkan hasil panen yang tinggi serta berkualitas. Pemeliharaan dilakukan sejak benih berkecambah hingga menjelang panen. Penyemprotan pestisida atau penggunaan agen hayati (musuh alami) melindungi tanaman dari kerusakan daun, batang, dan polong. Pemeliharaan yang baik mengurangi risiko kehilangan hasil akibat serangan hama seperti *ulat grayak*, *kutu daun*, atau penyakit *karat daun*. Penyiangan bertujuan menghilangkan gulma yang bersaing dengan tanaman kedelai dalam mendapatkan air, nutrisi, dan cahaya. Dengan gulma terkendali, pertumbuhan kedelai lebih seragam dan produktivitas meningkat.

Faktor lingkungan seperti ketersediaan air, suhu, intensitas cahaya, dan kesuburan tanah sangat mempengaruhi proses generatif kedelai. Kedelai termasuk tanaman peka terhadap cekaman pada fase generatif, terutama kekeringan dan suhu tinggi, yang dapat menyebabkan gugur bunga dan polong. Oleh karena itu, pengamatan pertumbuhan generatif juga berfungsi sebagai dasar evaluasi ketepatan waktu dan efektivitas pengelolaan budidaya, termasuk pemupukan, pengairan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Hasil pengamatan pertumbuhan generatif selanjutnya digunakan untuk menilai potensi hasil dan stabilitas produksi kedelai. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam penentuan produktivitas, seleksi genotipe unggul, serta perbaikan teknologi budidaya. Dalam konteks penelitian dan pengembangan, pengamatan fase generatif juga berperan penting dalam kegiatan pemuliaan tanaman kedelai, khususnya dalam mengidentifikasi karakter hasil dan ketahanan terhadap cekaman lingkungan.

Pengamatan pertumbuhan generatif pada tanaman kedelai merupakan komponen krusial dalam sistem evaluasi pertumbuhan dan produksi tanaman. Pengamatan yang dilakukan secara terencana, konsisten, dan terstandar akan menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung peningkatan produktivitas dan mutu hasil kedelai secara berkelanjutan.



D. Budidaya Padi Segreng Handayani

Padi Segreng merupakan salah satu varietas lokal yang berkembang di wilayah Gunungkidul dan dikenal memiliki karakteristik khas, baik dari segi morfologi maupun ketahanan terhadap kondisi lingkungan spesifik. Sebagai varietas lokal, Padi Segreng memiliki nilai genetik yang penting untuk dijaga dan dikembangkan, karena berpotensi menjadi sumber gen untuk toleransi terhadap cekaman biotik dan abiotik. Namun, sebelum dapat dimanfaatkan secara luas, varietas ini perlu melalui tahapan uji efektivitas untuk memastikan performa agronomisnya sesuai dengan standar yang diakui secara ilmiah dan nasional. Penerapan SNI pada rejuvinasi Padi Segreng tidak hanya merupakan bentuk peningkatan mutu kegiatan penelitian di kebun SDG, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat sistem pengelolaan sumberdaya genetik nasional. Melalui kegiatan ini, diharapkan diperoleh dasar ilmiah yang kuat untuk optimalisasi pemanfaatan varietas lokal, sekaligus mendukung konservasi keanekaragaman genetik padi di Indonesia secara berkelanjutan.



E. Penambahan Koleksi Tanaman di Kebun SDG BRMP DIY

Penambahan koleksi tanaman di kebun sumber daya genetik (SDG) merupakan bagian penting dalam upaya penguatan fungsi kebun sebagai pusat konservasi ex situ, sumber bahan pemuliaan, serta penyedia plasma nutfah yang berkelanjutan. Di lingkungan pengelolaan kebun SDG berbasis penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), kegiatan penambahan koleksi dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan memenuhi kaidah mutu serta ketertelusuran. Penambahan koleksi tanaman diawali dengan proses identifikasi kebutuhan koleksi yang mengacu pada rencana pengelolaan kebun SDG dan prioritas konservasi. Pemilihan bahan tanam mempertimbangkan kejelasan asal-usul sumber daya genetik, status legal dan perizinan, serta kesesuaian dengan tujuan pengelolaan kebun. Dalam konteks penerapan SNI, setiap bahan tanam yang ditambahkan harus memiliki identitas yang jelas, didukung oleh data asal, metode perbanyakan, dan informasi teknis lainnya yang relevan.



Kedondong



Jambu Dersono



Nangka



Tabebuia



Ceremai



Hoya

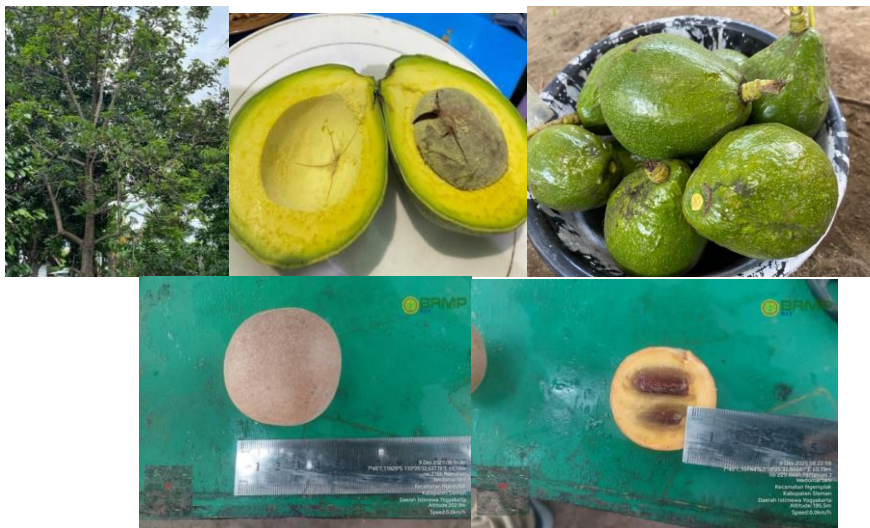


Murbei

F. Rekapitulasi Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Koleksi SDG BRMP DIY

Rekapitulasi pertumbuhan dan produksi tanaman koleksi kebun sumber daya genetik (SDG) merupakan kegiatan penting dalam rangka evaluasi kinerja pengelolaan kebun SDG yang berbasis standar. Rekapitulasi ini disusun sebagai bagian dari penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam pengelolaan kebun SDG, khususnya terkait aspek pengendalian mutu, ketertelusuran data, dan dokumentasi teknis.

Rekapitulasi produksi mencakup data hasil generatif tanaman, antara lain jumlah bunga, jumlah buah atau polong, bobot hasil per tanaman, serta estimasi produktivitas. Data produksi dihimpun dari tanaman yang telah memasuki fase produktif, dengan memperhatikan prinsip pemeliharaan kemurnian aksesori dan pemisahan antar koleksi. Dalam penerapan SNI, data produksi harus dilengkapi dengan informasi identitas aksesori, lokasi penanaman, dan periode panen untuk mendukung sistem ketertelusuran (*traceability*).



Seluruh data pertumbuhan dan produksi yang diperoleh selanjutnya direkapitulasi dalam format tabel dan basis data yang terstandar. Rekapitulasi ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja tanaman koleksi SDG, mengidentifikasi aksesori dengan keragaan baik maupun yang memerlukan perbaikan pengelolaan, serta mendeteksi potensi permasalahan seperti penurunan pertumbuhan, serangan organisme pengganggu tanaman, atau ketidaksesuaian lingkungan tumbuh. Dalam konteks penerapan SNI, rekapitulasi pertumbuhan dan produksi juga menjadi dokumen pendukung dalam kegiatan audit internal, penilaian kesesuaian, serta perencanaan perbaikan berkelanjutan. Data yang akurat dan terdokumentasi dengan baik menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pengelolaan kebun SDG, termasuk penataan ulang kebun, peremajaan tanaman, dan pengembangan koleksi prioritas. Dengan dilaksanakannya rekapitulasi pertumbuhan dan produksi tanaman koleksi SDG secara terstandar, BRMP DIY diharapkan mampu meningkatkan mutu pengelolaan kebun SDG secara berkelanjutan. Kegiatan ini mendukung terwujudnya kebun SDG yang tertib, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan konservasi, penelitian, pemuliaan, serta penyediaan bahan tanam bermutu sesuai dengan ketentuan SNI dan kebijakan nasional.

3.2. Realisasi Anggaran (Akuntabilitas Keuangan)

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan BRMP Yogyakarta pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik.

A. Anggaran dan Realisasi

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang pengkajian dan pengembangan Satker BRMP Yogyakarta pada TA. 2025 didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM).

Anggaran Satker BRMP Yogyakarta dicairkan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA BRMP Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 oleh Menteri Keuangan Nomor : SP DIPA-018.09.2.633975/2025, tanggal 2 Desember 2024. Terdapat 2 skenario DIPA blokir dan tanpa blokir.

Pada DIPA blokir, Pagu DIPA sebesar Rp 11.615.149.000,- dana yang terserap sebesar Rp. 10.992.930.692 atau 94,64%, sedangkan sisa anggaran Blokir sebesar Rp. 568.500.000 atau 4,89% dan sisa anggaran tidak terserap Rp 53.718.308,- atau 0,46% (Anggaran tersebut masih di blokir tahun 2025 meliputi Dukungan manajemen – Kegiatan LTT). Alokasi anggaran BRMP Yogyakarta berdasarkan jenis belanja (menurut DIPA tahun 2025) terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang (Barang operasional dan non operasional). Berdasarkan proporsinya, maka anggaran belanja yang paling besar dari total anggaran adalah belanja pegawai yaitu sebesar Rp 6.656.022.000- (57,30%) dengan realisasi Rp. 6.614.331.688 (99,37%), kemudian terdapat belanja barang operasional Rp 4.808.140.000 (41,39%) dengan rincian belanja barang operasional sebesar Rp 3.213.738.000,- (27,66%) dan belanja barang non operasional sebesar Rp. 1.594.402.000,- (13,72%). Kemudian belanja modal sebesar 150.987.000, - (1,29%).

Sedangkan jika menggunakan DIPA tanpa blokir, Pagu DIPA sebesar Rp. 11.046.649.000,- dana yang terserap sebesar Rp. 10.992.930.692,- atau 99,51%, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 53.718.308,- atau 0,48% (anggaran tersebut asumsi sudah blokir tahun 2025 meliputi dukungan majamenen – kegiatan LTT). Alokasi anggaran BRMP Yogyakarta berdasarkan jenis belanja (menurut DIPA tahun 2025) terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang (barang operasional dan non operasional). Berdasarkan proporsinya, maka anggaran belanja yang paling besar dari total anggaran adalah belanja Pegawai yaitu sebesar Rp 6.656.022.000- (57,30%) dengan realisasi Rp. 6.614.331.688 (99,37%), kemudian terdapat belanja barang operasional Rp 4.239.640.000,- (38,37%) dengan rincian belanja barang operasional sebesar Rp.2.645.238.000,- (23,94 %) dan belanja barang non operasional sebesar Rp. 1.594.402.000,- (14,43%). Kemudian belanja modal sebesar 150.987.000, - (1,36%).

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Realisasi keuangan Satker BRMP Yogyakarta atas dasar SP2D sampai dengan akhir TA. 2025 mencapai Rp 10.992.930.692,- atau 99,51%, dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2025. Realisasi anggaran terendah pada belanja barang non opsional sebesar Rp 4.220.387.544 (87,78%). Realisasi anggaran tertinggi pada belanja pegawai yaitu sebesar Rp 6.614.331.688 (99,37%).

Tabel 7. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Belanja TA. 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1.	Belanja Pegawai	6.656.022.000,-	6.621.465.588,-	99,48
2.	Belanja Barang Operasional	3.212.728.000,-	3.203.651.399,-	99,69
3.	Belanja Barang Non Operasional	1.025.902.000,-	1.017.335.345,-	99,16
4.	Belanja Modal	150.987.000,-	150.987.360,-	99,66
	Total Belanja Kotor	11.046.649.000,-	10.992.930.692,-	99,51
	Pengembalian Belanja			
	Total Belanja	11.046.649.000,-	10.992.930.692,-	99,51

Catatan : Laporan keuangan s.d. 31 Desember 2025.

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Realisasi keuangan Satker BRMP Yogyakarta atas dasar SP2D sampai dengan akhir TA. 2025 mencapai Rp 11.046.649.000,- atau 99,51%, dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2025.

G. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya Standar Biaya Kegiatan (SBK).

Tabel 8. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Standar Biaya Kegiatan (SBK) TA 2025

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9/11	13 = 8-12	14 = 13/8	15	16
1	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	Program Dukungan Manajemen	Layanan BMN (Layanan)	SBK	Layanan BMN untuk Satker Eselon I (Setingkat	480.000.000	9.873.500	1,00	1,00	9.873.500	470.126.500	98	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%), Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah Indeks SBKU.
2	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	Program Dukungan Manajemen	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBK	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	458.000.000	26.500.000	1,00	1,00	26.500.000	431.500.000	94	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%), Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah Indeks SBKU.
3	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	Program Dukungan Manajemen	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBK	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	18.067.700	1,00	1,00	18.067.700	221.932.300	92	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%), Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah Indeks SBKU.

Berdasarkan Hasil Monitoring Efisiensi Standar Biaya Kegiatan (SBK), kinerja penggunaan sumber daya Balai pada periode pelaporan menunjukkan tingkat efisiensi yang baik hingga sangat baik. Hal ini tercermin dari nilai indeks efisiensi SBK yang berada pada kategori ≥ 1 , yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan input berupa anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana telah mampu menghasilkan output layanan secara optimal. Dengan realisasi biaya yang terkendali dan capaian output yang sesuai dengan target, Balai telah menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai, khususnya pada sasaran meningkatnya kualitas layanan teknis dan dukungan operasional. Pemanfaatan SDM yang proporsional dengan beban kerja serta optimalisasi penggunaan fasilitas dan peralatan Balai menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah selaras dengan perencanaan kinerja dan penganggaran berbasis hasil (performance based budgeting). Kondisi ini mendukung peningkatan produktivitas layanan tanpa menimbulkan tambahan beban biaya yang tidak diperlukan.

Secara keseluruhan, hasil analisis efisiensi SBK menunjukkan bahwa Balai telah melaksanakan pengelolaan sumber daya secara akuntabel dan berorientasi pada hasil. Capaian efisiensi ini menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sekaligus memperkuat peran Balai dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian, khususnya dalam peningkatan kinerja layanan, modernisasi tata kelola, dan efektivitas belanja negara di sektor pertanian.

H. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 605.070.881,00 atau mencapai 134.4 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 450.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum		82.745.381	100 %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	450.000.000	521.325.500	134.4 %
Pendapatan Lain-Lain	0	1.000.000	100 %
Jumlah	450.000.000	605.070.881	134.4

Realisasi Pendapatan TA. 2025 mengalami kenaikan sebesar 75 % dibandingkan TA 2024. Kenaikan ini disebabkan antara lain karena pada tahun ini terdapat banyaknya setoran dari PNBP Umum pada tahun 2025 , kenaikan pada penjualan hasil pertanian serta pengembalian anggaran TAYL. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BRMP YOGYAKARTA adalah sebagai berikut:

**Tabel 10. Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Kenaikan %
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	82.745.381	75.371.500	109,78
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	521.325.500	247.709.698	210,45
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	
Pendapatan Lain-Lain	1000.000	136.010.390	(0,73)
Jumlah	605.070.881	459,091,588	131,79%

BAB IV. PENUTUP

Anggaran Satker BRMP Yogyakarta dicairkan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA BRMP Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 oleh Menteri Keuangan Nomor : SP DIPA-018.09.2.633975/2025, tanggal 2 Desember 2024. Pagu DIPA sebesar Rp. 11.046.649.000,- dana yang terserap sebesar Rp. 10.992.930.692,- atau 99,51%, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 53.718.308,- atau 0,48 (anggaran tersebut asumsi sudah blokir tahun 2025 meliputi dukungan majamenen – kegiatan LTT). Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program-program BRMP dalam mendukung Program Kementerian Pertanian, terutama program strategis mendukung target sukses pembangunan pertanian.

Pada tahun 2025 telah dihasilkan adalah (1) Meningkatnya pelaku usahatani yang menerapkan standar pertanian (1 SNI/ 1 lembaga usahatani); (2) Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan adaptif (0 unit tidak ada anggaran kegiatan di tahun 2025); (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, berupa memperoleh Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta (nilai 84,91); (4) Terkelolanya anggaran BRMP Yogyakarta yang akuntabel dan berkualitas, berupa memperoleh Nilai Kinerja Anggaran Balai Modernisasi Pertanian Yogyakarta dengan Nilai 98,72 (Kategori Sangat Baik).

Terdapat hambatan dan kendala dalam kinerja balai, dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah : 1) mengoptimalkan SDM yang ada dan meningkatkan kapasitas SDM melalui training jangka pendek dan panjang, 2) melakukan perbaikan rencana kegiatan dan RKA-KL, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, serta penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai ketersediaan anggaran.

LAMPIRAN:

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Pelaksanaan Kegiatan di IP2MP Banyakan Bantul

Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) terletak di Banyakan, Bantul memiliki luaslahan 4,3 Ha, terdiri dari lahan perkantoran, gudang dan kandang 0,4 Ha,persawahan 1,7 Ha, lahan kering 0,7 Ha dan lahan perbukitan 1,5 Ha.



Pemanfaatan Kebun Percobaan (KP) IP2MP Banyakan telah dimanfaatkan seiring dengan transformasi kelembagaan yang terjadi mulai dari BPTP, BSIP dan BRMP. Pada tahun 2023 lahan sudah mulai digunakan untuk kegiatan koleksi sumber daya genetik (SDG) tanaman (ubikayu), pengujian dan penerapan teknologi tanaman pangan dan hortikultura serta unit pengelola benih sumber (UPBS).

IP2MP Banyakan memiliki beberapa peran strategis yaitu : sebagai kebun koleksi plasma nutfah (SDG) tanaman dan ternak, kegiatan pengujian dan penerapan teknologi pertanian; sebagai unit pengolah benih sumber (UPBS); sebagai show window hasil pengujian; Sebagai tempat pengujian pupuk dan uji multilokasi tanaman pangan dan hortikultura; sebagai lokasi pengembangan agrowisata sekaligus sebagai media display pameran penerapan teknologi pertanian mendukung diseminasi, sistem informasi dan sosialisasi modernisasi teknologi pertanian.

Menindaklanjuti amanah Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomer 1255/KPTS/PL.020/H/10/2025 tentang Penetapan Instalasi Pengujian dan Penerapan

Modernisasi Pertanian dan Laboratorium pada Unit Pelaksana teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, tertanggal 09 Desember 2025, untuk mewujudkan peran Kebun Percobaan sebagai Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian, selanjutnya disingkat IP2MP, adalah unit fungsional strategis di lingkungan UPT BRMP yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian, validasi, dan adaptasi teknologi, inovasi, dan praktik modernisasi pertanian, memfasilitasi penerapannya secara luas di lapangan, serta mengelola dan memanfaatkan fasilitas instalasi sebagai pusat perakitan, pengujian dan penerapan serta demonstrasi teknologi pertanian modern.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di IP2SIP Banyakan selama tahun 2025 sebagai berikut :

1. **Budidaya Padi Inpari 33, dan Inpari 42.**

Kegiatan tanam dilaksanakan dengan menggunakan sistem dapok menggunakan transplanter sebagai alat tanamnya. Luasan lahan yang digunakan sebagai lahan produksi benih seluas 1,2 Ha. Hasil panen telah dilakukan prosesing dan menghasilkan benih sebanyak 2.025 kg. Kegiatan ini bekerjasama dengan UPBS BRMP Yogyakarta.



2. Kegiatan Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB)

Indukan ayam KUB berasal dari seleksi indukan dan pejantan hasil produksi IP2MP Banyakan BRMP Yogyakarta dan mendatangkan DOC F1 dan BRMP Jawa Tengah. Hasil produksi telur fertile yang memenuhi syarat/standar ditetaskan dengan menggunakan mesin tetas sesuai standar. Jumlah produksi DOC pada Tahun 2025 sebanyak 17.291 ekor DOC dan telah didistribusikan di sekitar wilayah DIY dan Jawa Tengah dengan tarif sesesuai dengan ketentuan PNBP.



3. Display Budidaya Cabai pada lahan sempit

Display pemanfaatan lahan disekitar kantor dan lahan kosong sebagai upaya mengoptimalkan lahan dan pekarangan. Lokasi lahan berada di sekitar screenfil, dan sebelah barat kantor KP. Tujuan penggunaan lahan ini adalah sebagai display agar dapat di adopsi oleh masyarakat dan pengunjung kebun IP2MP Banyakan dalam memanfaatkan lahan pekarang sekitar rumah.



4. Display Budidaya Rumput Unggul

Bibit rumput diperoleh dari Balai Besar Biogen dan mulai dibudidayakan di IP2TP Banyakan. Bibit rumput yang dibudidayakan sebanyak 400 stek meliputi varietas Biovitas dan Biograss. Hasil panen didiseminasikan ke peternak kambing dan sapi di wilayah Nglanggeran Gunungkidul, Sleman, Bantul hingga Klaten bahkan Balai Benih Propinsi Jawa Tengah. Total bibit rumput yang telah didiseminasikan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 sebanyak $\pm$ 482.880 stek yang tersebar DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah.



5. Display Budidaya Anggur dan Strawberi

Kegiatan budidaya anggur dilaksanakan dalam screenfield dalam pot berukuran 75 L dengan sistem rambatan teralis Y. Populasi tanaman anggur sebanyak 15 tanaman dengan 5 varietas meliputi : Satriya Tamansari, Ja-1 harold, Laura, Transfigurasi dan Julian.



Budidaya Strawberry memanfaatkan lahan seluas dengan jumlah 200 polybag. Budidaya strawberry di IP2MP Banyakan bertujuan untuk mengoptimisasi greenhouse, display dan upaya mengadaptasikan tanaman strawberry yang biasanya tumbuh di dataran tinggi (1.000 MDPL) untuk dibudidayakan pada lahan dataran rendah 115 MDPL.



6. IP2MP Banyakan BRMP D.I.Yogyakarta sebagai Wahana Agro-Eduwisata.

Selama tahun 2025 terdapat kunjungan tamu dari berbagai pihak dimana mereka berkunjung sebagai wahana study banding atau rekreasi khususnya dalam modernisasi pertanian dan penerapan standar instrument pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Kunjungan yang terlaksana pada Tahun 2025 sebanyak 5 kali; meliputi TK Ibnu Qoyim, Bumdes Sumberkencono Ponjong Gunungkidul, PB Borneo Indobara, Sekolah IT Omah Lintang, BBPP MPV SB.



7. Display Budidaya Domba Spesifik lokasi

Kebutuhan ternak domba yang besar mendorong preferensi masyarakat untuk beternak domba dan kambing. IP2MP Banyakan membuat display budidaya domba mendukung perbibitan domba unggul dan sebagai display budidaya domba spesefik lokasi berdasarkan pada SNI 8819-2019 dan No. 102/Permentan /OT.140/7/2014. Perkembangan populasi domba pada awal tahun 2023 43 ekor mengalami kelahiran sebanyak 25 ekor, kematian 8 ekor, dan dijual kepada kelompok ternak untuk di kembangbiakan senayak 16 ekor. Total akhir populasi domba pada Desember 2025 adalah 43 ekor.



8. Budidaya Lahan Marginal Perbukitan terstandar spesifik lokasi mendukung modernisasi pertanian Di IP2MP Banyakan.

IP2MP Banyakan mempunyai topografi perbukitan seluas 1,5 Ha, dengan kondisi lahan tandus, berbatu dengan solum antar 30 s/d 40 cm. Lahan bukit telah dilakukan penataan dengan membuat akses jalur berupa tataan batu, terasiring dan clearing lahan dengan membersihkan tanaman liar maupun gulma. Lahan secara bertahap telah ditanami tanaman buah jeruk, buah kelengkeng, buah mangga, sumber hijauan makanan ternak legum dan rumput biograss. Realisasi penanaman yang telah berhasil dirawat dan berbuah pada tahun 2025 adalah tanaman jeruk sebanyak 130 batang, dan pada tahun 2025 telah melaksanakan penanaman kembali aneka buah-buahan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bukit IP2MP Banyakan sebagai kebun buah sebagai berikut:

No	Nama Tanaman	Jumlah Tanaman	Tanaman di Bukit	Tanaman Lahan Tegalan
1	Alpukat	16	11	5
2	Durian	3	1	2
3	Mangga	15	13	2
4	Belimbing	4	4	0
5	Rambutan	3	3	0
6	Jambu Dersono	3	3	0
7	Kelengkeng	6	6	0
Total		50	41	9



B. Pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) mendukung Swasembada Nasional

Di era pemerintahan yang baru, pemerintah terus berkolaborasi dan berkontribusi untuk memberikan kinerja terbaik demi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui program swasembada pangan tahun 2025. Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan luas lahan panen padi di Indonesia pada 2023 diperkirakan sekitar 10,20 juta hektare, mengalami penurunan sebanyak 255,79 ribu hektare atau 2,45 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 sebesar 10,45 juta hektare. Produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,90 juta ton, mengalami penurunan sebesar 645,09 ribu ton atau 2,05 persen dibandingkan produksi beras di 2022 sebesar 31,54 juta ton. Pada tahun 2024, Indonesia secara nasional mengalami penurunan luas panen dan produksi padi, dengan luas panen padi sekitar 10,05 juta hektare (turun 1,64% dari 2023) dan produksi 53,14 juta ton GKG (turun 1,55% dari 2023), menghasilkan beras sekitar 30,62 juta ton (turun 1,54% dari 2023). Penurunan ini menunjukkan pemulihan dari penurunan yang lebih tinggi sebelumnya pada tahun 2023/2024, namun angka produksi 2024 masih di bawah tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan, Indonesia tetap menjadi produsen beras terbesar keempat dunia, dengan proyeksi FAO bahkan memprediksi lonjakan produksi di tahun-tahun berikutnya. Program swasembada pangan diharapkan menjadi solusi dan strategi terbaik dari berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan nasional di masa depan.

Program Swasembada Pangan 2025 adalah program yang menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional yang membutuhkan peran dari berbagai kalangan baik dari masyarakat, pemerintah, serta perusahaan swasta. Program ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada serta memperluas cakupan dan luas lahan panen khususnya komoditas padi dan jagung sehingga bisa meningkatkan produksi beras dan jagung di Indonesia untuk mendukung target swasembada pangan tahun 2025.

Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yaitu Cetak Sawah Rakyat, Brigade Pangan, LTT reguler dan Padi Gogo. Dasar hukum penugasan swasembada pangan ditetapkan melalui SK Menteri Pertanian Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanggungjawab Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Kegiatan Swasembada Pangan.

Ruang Lingkup Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian meliputi : 1) Koordinasi, 2) Pendampingan dan 3) Monitoring Evaluasi. Kegiatan koordinasi untuk memastikan tercapainya kemandirian pangan nasional secara efektif dan efisien melalui sinergi antar pihak yang terlibat, Kegiatan pendampingan untuk memberikan pendampingan, bimbingan teknis, bagi petani/keompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan ekonomi petani/Brigade Pangan dalam menerapkan pertanian modern pada kegiatan usahatani untuk mencapai swasembada pangan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan penerapan pertanian modern dan pencapaian swasembada pangan. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan swasembada pangan yaitu Penanggungjawab Swasembada pangan Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, PPL, Petani, Kelembagaan Petani, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Bulog dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Kegiatan LTT di Provinsi D.I. Yogyakarta dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025 di 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo dan Sleman serta Kota Yogyakarta. Kegiatan swasembada pangan melalui pengawalan kegiatan LTT ini bertujuan untuk : 1) Mensinergiskan pelaksanaan kegiatan dengan

seluruh stakeholders terkait di provinsi DIY melalui koordinasi dan sinkronisasi program, 2) Pendampingan, pengawalan dan akselerasi pelaksanaan kegiatan di Provinsi DIY, 3) monitoring dan evaluasi berupa laporan capaian target dan outcome hasil pendampingan. Keluaran yang diharapkan adalah: 1) Meningkatnya sinergi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan LTT dengan seluruh stakeholder di pusat dan daerah, 2) Meningkatnya pendampingan, pengawalan dan akselerasi capaian target LTT di Provinsi DIY, 3) Meningkatnya produksi tanaman pangan khususnya padi di wilayah Provinsi DIY.

Pendekatan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan klasikal dengan metode *face to face* communication dan rapat koordinasi terjadwal, diskusi untuk penyelarasan program LTT dengan pengambil kebijakan dan pelaksana di tiap kabupaten serta identifikasi dukungan kebutuhan swasembada pangan mulai dari hulu hingga hilir. dan identifikasi respon petani/kelompok tani/Gapoktan untuk mengetahui umpan balik terhadap dukungan pencapaian target swasembada pangan.

Hasil pelaksanaan kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian khususnya Program Swasembada Pangan meliputi:

1. Koordinasi

Koordinasi kegiatan dilakukan dengan stakeholder pusat dan daerah untuk sinkronisasi program dan kegiatan. Sesuai SK Menteri Pertanian Nomor SK Menteri Pertanian Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanggungjawab Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Kegiatan Swasembada Pangan sebagai penanggungjawab kegiatan LTT Provinsi DIY adalah Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Direktur Perbenihan sekaligus sebagai penanggungjawab LTT Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Sedangkan penanggungjawab LTT Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo adalah Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) DIY. Rapat koordinasi LTT dalam rangka penetapan target LTT kabupaten/kota dilaksanakan secara rutin pada awal bulan berjalan di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Provinsi. Berdasarkan data Kementerian ATR-BPN Luas Baku Sawah (LBS) di Provinsi DIY mencapai 67.027 Ha. Target luas tanam padi di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2025 pada awalnya ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebesar 198.696,25 Ha, sementara kesanggupan dari Provinsi DIY seluas 138.709,33 Ha (69,47%). Target penanaman padi pada bulan Januari-Desember 2025 pada akhirnya ditetapkan seluas 155.218,90 Ha (pusat). Pelaksanaan koordinasi juga membahas strategi dan langkah-langkah teknis dalam rangka percepatan pencapaian target swasembada pangan melalui kegiatan Luas Tambah Tanam (LTT).



2. Pendampingan

Pendampingan kegiatan LTT dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Gerakan Tanam (Gertam), Gerakan Panen (Gernen), pendampingan kunjungan pejabat pusat (Kementan, Komisi IV DPR), Serap Gabah Petani (Sergap) Bulog, narasumber inovasi teknologi, bimbingan teknis poligonisasi lahan dengan aplikasi Arc Field Measure Pro dan sosialisasi SISCrop V.2.0. Gerakan tanam serentak dilaksanakan melalui zoom online bersama Presiden RI di tiap kabupaten pada tanggal 6 April 2025. Bupati Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Gertam pada tanggal 23 April 2025 dan 24 Oktober 2025 di Tayuban Panjatan dan Wijimulyo Nanggulan. Pada kesempatan tersebut dilakukan demonstrasi penggunaan alat tanam rice transplanter manual sederhana, penyerahan benih dan alsintan untuk kelompok tani dan BPP. Penggunaan Rice Transplanter terbukti dapat menghemat biaya, jumlah tenaga kerja dan mempercepat waktu tanam. Gerakan tanam juga dilakukan di Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 6 Desember 2025. Bupati Gunungkidul menyerahkan bantuan benih padi untuk Poktan dan Gapoktan dan alat Perangkat Uji tanah Sawah (PUTS) kepada 18 BPP se-Kabupaten Gunungkidul. Gerakan tanam dan panen juga dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri Pertanian di Kabupaten Bantul, Dirjen Tanaman Pangan di Kabupaten Sleman, dan Ketua Komisi IV DPR RI di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan Serap Gabah Petani dilakukan bersama Bulog Kanwil DIY, Babinsa, PPL dan Kelompok Tani. Narasumber inovasi teknologi dilaksanakan diantaranya melalui kegiatan Sekolah Lapang (SL) Tematik dengan sosialisasi penggunaan pupuk berimbang, demonstrasi penggunaan alat rice transplanter sederhana dan penyediaan bibit dengan metode dapog seeding, pengendalian hama penyakit tanaman dan penggunaan alsintan pra tanam traktor di lahan kering.

Bimbingan teknis poligonisasi lahan dengan aplikasi Arc Field Measure Pro dan sosialisasi SISCrop V.2.0 dilaksanakan di 56 BPP se-DIY yaitu Kabupaten Gunungkidul (18 BPP), Kabupaten Kulon Progo (12 BPP), Kabupaten Bantul (17 BPP), Kabupaten Sleman (8 BPP) dan Kota Yogyakarta (1 BPP). Poligonisasi lahan pertanian adalah pemetaan batas digital berbentuk area (poligon) pada lahan pertanian untuk mendapatkan data akurat tentang lokasi, bentuk, dan luas lahan, yang penting untuk perencanaan, penyaluran bantuan, dan monitoring program pemerintah seperti pendataan Luas Baku Sawah (LBS) dan e-Alokasi pupuk dengan menggunakan GPS dan aplikasi digital.

SISCrop V.2.0 merupakan sistem informasi berbasis penginderaan jauh yang memberikan informasi tentang kondisi faktual tanaman padi dan tanaman lainnya di lapangan. SiSCrop memanfaatkan data citra satelit Sentinel-1 untuk memonitor lahan pertanian dan kondisi tanaman seperti fase pertumbuhan padi, luas tanam, luas panen, produktivitas, dan indeks pertanaman sesuai kondisi di lapangan. Informasi pada SISCrop2.0 divisualisasikan melalui peta interaktif secara spasial, data numerik berbentuk tabular dan grafik, yang diupdate setiap 15 hari dengan rasio 10x10 meter. SiSCrop 2.0 juga dilengkapi dengan informasi produktivitas padi sawah di seluruh Indonesia. Respon PPL positif dan menyampaikan bahwa bimtek poligonisasi dan pemanfaatan data SISCrop sangat bermanfaat untuk pelaporan dan meningkatkan akurasi data di lapangan.



3. Monitoring dan Evaluasi dan Pengukuran Outcome

Monitoring dan evaluasi kegiatan LTT dilaksanakan di Provinsi DIY meliputi aspek hulu hingga hilir. Parameter yang diamati meliputi bantuan dan penggunaan benih/bibit, distribusi dan pemanfaatan pupuk bersubsidi, distribusi bantuan dan pemanfaatan alat mesin pra tanam (pompa, irpom, irpip, traktor, cultivator), alat mesin pasca panen (combine harvester) dan pelaksanaan kegiatan Sergap Bulog. Pengukuran outcome meliputi pelaporan data peningkatan produksi dan produktivitas. Metode kegiatan dengan melakukan wawancara responden petani di BPP sebanyak 30-40 orang per kabupaten di DIY dengan jumlah total responden sebanyak 120 orang.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa 1) Program pupuk bersubsidi mayoritas petani menerima pupuk sesuai alokasi (Urea/NPK), penggunaan pupuk sesuai rekomendasi teknis, pupuk mampu meningkatkan hasil tanaman, kendala jumlah pupuk kurang dan belum diterima tepat waktu; 2) Program bantuan benih mutu fisik benih baik dan sesuai kebutuhan, daya tumbuh tinggi dan varietas sesuai preferensi, kendala benih adalah ketahanan terhadap serangan hama penyakit dan harapan petani adanya pendampingan teknis dan keberlanjutan pasokan benih; 3) program bantuan alsintan, alsintan diterima dalam kondisi baik dan digunakan rutin, dapat mempercepat proses tanam dan panen, kendalanya adalah biaya operasional dan keterbatasan operator terlatih, harapan petani adalah pelatihan operator dan penguatan UPJA; 4) Program Sergap Harga gabah stabil sesuai HPP (Rp 6.500/kg) dan prosesnya transparan, program Sergap membantu menjaga harga gabah di tingkat petani, kendalanya adalah kuota pembelian gabah terbatas sesuai target serapan dan kemampuan Bulog daerah dan harapan petani adanya perluasan akses petani dalam program Sergap.

Target penanaman padi pada bulan Januari-Desember 2025 berdasarkan hasil rapat koordinasi Satgas LTT Provinsi DIY akhirnya ditetapkan seluas 155.218,90 Ha (pusat). Per tanggal 31 Desember 2025 capaian LTT padi di Provinsi DIY mencapai 144.540,63 Ha atau mencapai 96,41% dari target Kementerian Pertanian dan terkategori zona hijau (> 85%). Panen diperkirakan pada bulan Maret-April 2026 untuk menghitung produksi dan tingkat produktivitas.



C. Program ICARE (Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment)

Program ICARE (Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment) adalah inisiatif strategis Kementerian Pertanian RI yang bekerja sama dengan Bank Dunia untuk memodernisasi, meningkatkan efisiensi, dan daya saing pertanian Indonesia melalui pengembangan kawasan pertanian terintegrasi berbasis inovasi dan teknologi, mulai dari hulu hingga hilir (budidaya, pasca-panen, pemasaran) untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini berlangsung pada tahun 2022-2027 dan fokus pada penguatan rantai nilai, digitalisasi, mekanisasi, serta pengembangan sumber daya manusia unggul pertanian untuk mencapai ketahanan pangan dan nilai tambah ekonomi.

Tujuan utama Program ICARE adalah : 1) Peningkatan produksi dan produktivitas dengan gerakan nasional pengembangan sumber daya manusia dan teknologi pertanian, 2) Efisiensi biaya melalui pengembangan kawasan pertanian berbasis inovasi, korporasi, dan mekanisasi, 3) Modernisasi dan Digitalisasi dengan percepatan teknologi, sensor IoT, dan sistem informasi terintegrasi untuk pengambilan keputusan cerdas, 4) Penguatan rantai nilai melalui pengelolaan terintegrasi dari hulu (budidaya) hingga hilir (pemasaran), dan 5) Kemitraan, kolaborasi erat dengan swasta untuk investasi dan pengembangan pasar. Mekanisme pendukung berupa pelaksanaan Competitive Grant (CG) yaitu hibah kompetitif untuk mempercepat inovasi teknologi serta penerapan sistem informasi terintegrasi untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.

Pisang (*Musa paradisiaca L.*) merupakan tanaman asli Asia Tenggara termasuk Indonesia dan sangat digemari oleh sebagian besar penduduk dunia. Pisang termasuk tanaman buah tropika beriklim basah dengan curah hujan sepanjang tahun berkisar 1500-2500 mm per tahun. Tanaman pisang menyebar di seluruh Indonesia dengan sentra produksi di pulau Jawa.

Program ICARE dengan topik Model Agribisnis Pisang Terstandar Berbasis Korporasi Petani Mendukung Pasar Ekspor dilaksanakan di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah selama tiga bulan pada periode Oktober-Desember 2025. Ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi rantai pasok dan rantai nilai komoditas pisang, sosialisasi GAP dan GHP adaptif perubahan iklim dan ramah lingkungan dan GMP mendukung pasar ekspor dan penguatan kelembagaan korporasi petani pisang mendukung pengembangan Kawasan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah 1) Melaksanakan *survey* terkait sistem rantai pasok dan rantai nilai agribisnis pisang di Kabupaten Brebes, 2) Melaksanakan sosialisasi GAP, introduksi SOP kebun pisang terstandar adaptif perubahan iklim dan ramah lingkungan, diversifikasi produk olahan berkualitas ekspor dan penguatan Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk penerapan GMP, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK dan packaging terstandar, 3) Melaksanakan pendampingan dan penguatan kelembagaan kelompok tani produsen pisang dan korporasi petani pisang dan 4) Melaksanakan evaluasi kelayakan dan dampak ekonomi dari penerapan sistem agribisnis pisang terstandar ekspor.

Keluaran kegiatan ini meliputi 1) Informasi kondisi terkini terkait rantai pasok dan rantai nilai agribisnis pisang di Kabupaten Brebes, 2) Terlaksananya sosialisasi GAP dan SOP kebun pisang terstandar adaptif iklim dan ramah lingkungan, terlaksananya diversifikasi produk olahan berkualitas ekspor dan penguatan Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk penerapan GMP dan packaging terstandar, diterapkannya SNI Bina UMK dan produk olahan oleh UMK, 3) Terlaksananya pendampingan dan penguatan kelembagaan kelompok tani produsen pisang dan korporasi petani pisang, 4) Informasi kelayakan dan dampak ekonomi dari penerapan sistem agribisnis pisang terstandar tahun pertama.

Hasil pelaksanaan kegiatan di tiga desa yaitu Desa Babakan, Kalibuntu dan Kedungneng

telah dilaksanakan survei rantai nilai dan rantai pasok komoditas pisang, sosialisasi VUB Pisang dan SOP Kebun Pisang Terstandar, pelatihan diversifikasi olahan keripik pisang aneka rasa dan pembuatan es krim pisang, pembuatan solar dryer house sebagai bagian modernisasi pertanian untuk pengeringan dan penyediaan bahan baku chips dan tepung pisang, didukung dengan pemberian bantuan aneka alat olahan pisang dan pencantuman tanda SNI Bina UMK. Pengembangan kelembagaan juga telah dilakukan kerjasama atau MOU dengan Koperasi Tumbuh Gelimang Pangan (TGP) Kalibuntu.

Survei rantai nilai dan rantai pasok menunjukkan bahwa actor yang berperan dalam pemasaran komoditas pisang di lokasi pendampingan adalah petani, pengepul dan pedagang eceran. Harga pisang di tingkat petani mencapai Rp 2.750-3.500/kg, margin di tingkat pengepul untuk pasar lokal berkisar Rp 200-300/kg dan Rp 600-700/kg untuk pasar luar kota. Pemasaran dilakukan di tingkat desa dan kabupaten, sedangkan pasar luar kota hasil panen pisang dikirim ke Cikijing Kabupaten Majalengka dan Pasar Andir Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Sosialisasi VUB Pisang ditekankan pada penggunaan bibit pisang hasil kultur jaringan untuk menjamin mutu bibit dan kesehatan tanaman. Jenis pisang yang dikembangkan di lokasi diantaranya adalah pisang Raja Nangka, dan Kampleng untuk bahan baku keripik pisang dan Cavendish untuk pisang segar program MBG. Koneksitas diharapkan dapat terjalin dengan Kebun Bibit Plasma Nutfah Pisang Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta yang mempunyai akses pisang 321 jenis dan menyediakan bibit pisang hasil kultur jaringan yang bersertifikat dan terjamin kualitasnya serta bebas hama penyakit. Keripik pisang adalah produk makanan ringan dibuat dari irisan buah pisang dan digoreng. Tujuan pengolahan pisang menjadi keripik pisang adalah untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan atau memperpanjang kemanfaatan buah pisang. Syarat mutu keripik pisang mengacu SNI 01-4315-2009, keripik pisang. Standar teknis ini berlaku untuk pembuatan pisang menjadi keripik pisang. Pelatihan dan bimbingan teknis diversifikasi olahan pisang termasuk perbaikan untuk optimalisasi alat berupa spinner (peniris) dan slicer (perajang) di KWT Rejeki Sejahtera, pelatihan pembuatan keripik pisang aneka rasa dan es krim dengan beberapa varian rasa direspons positif dan dilakukan pembuatan solar dryer house sebagai modifikasi solar dryer dome yang dirintis Kementan dengan ukuran 300 x 250 x 200 cm atau dimensi 15 m³ untuk pengeringan produk segar olahan pangan.

Solar Dryer adalah rumah pengering berbasis energi matahari yang dirancang khusus untuk mempercepat proses pengeringan hasil pertanian. Berbeda dengan cara konvensional yang menjemur di ruang terbuka, sistem ini menggunakan rangka galvanis anti karat, atap plastik UV impor, serta desain khusus yang mampu menjaga kestabilan suhu di dalam ruangan. Selain itu, pengguna tidak lagi harus khawatir terhadap hujan mendadak atau kontaminasi dari luar. Dengan memanfaatkan teknologi sederhana namun efektif, Solar Dryer memungkinkan pengeringan lebih cepat, hemat energi, serta tetap menjaga kualitas dan nilai jual hasil panen. Karena itulah, sistem ini sangat cocok bagi petani kecil maupun industri agribisnis berskala besar. Solar Dryer House (hybrid) ini dilengkapi panel control otomatis yang mampu menjaga kestabilan suhu dan kelembapan didalam ruang pengeringan untuk kualitas hasil panen komoditas pisang menjadi lebih berkualitas. Dengan sistem hybrid proses pengeringan masih dapat bekerja dalam kondisi curah hujan yang tinggi maupun suhu yang rendah.

MOU yang terjalin antara BRMP DIY dan Koperasi TGP mencakup pengembangan olahan produk pisang. Bantuan berupa investasi alat olahan meliputi grinder, spinner, slicer, mesin es krim, cooler box, freezer, meja produksi *stainless*, solar dryer house sebagai bagian unit usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi TGP. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Koperasi TGP diantaranya pengoperasian RMU (Rice Milling Unit), pengelolaan UPJA (Unit Pengelolaan Jasa Alsintan) dan unit produksi dan olahan pangan berbasis komoditas padi dan pisang.

Tantangan yang dihadapi ke depan secara internal adalah perlu upaya khusus dan terus menerus untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian diantaranya melalui

pelatihan dan pendampingan teknis untuk pengelolaan dan pengembangan usaha agribisnis pisang. Selain itu persaingan penggunaan lahan dengan komoditas padi perlu diantisipasi. Harga gabah yang mengalami peningkatan sesuai Harga Patokan Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500/kg GKP menyebabkan sebagian petani pisang merombak lahan kebun pisang menjadi lahan sawah untuk budidaya padi. Di satu sisi hal ini berimplikasi positif karena ada perluasan lahan sawah yang berpotensi untuk peningkatan produksi dan produktivitas padi mendukung swasembada pangan nasional, namun di sisi lain mengancam keberlangsungan usaha agribisnis pisang karena adanya penurunan lahan budidaya yang berakibat pada penurunan hasil panen dan ketersediaan bahan baku pisang olahan.



D. Pelayanan Informasi Publik

Sasaran layanan informasi publik BRMP D.I. Yogyakarta meliputi Pelayanan informasi publik melalui website Balai; Pelayanan informasi publik melalui media sosial Balai, Pelayanan informasi publik melalui kantor informasi publik Balai dan Pelayanan informasi publik melalui acara-acara publik dan kegiatan promosi.

Selama tahun 2025 jumlah tamu yang hadir di BRMP D.I. Yogyakarta dalam melakukan kunjungan, konsultasi dan kerjasama sejumlah 1.208 Orang, dimana yang hadir terdiri dari kalangan instansi, Akademisi, petani, Poktan gapoktan, Swasta lingkup stake holder pertanian Nasional, internasional dan Global. Anggaran layanan Humas dan Informasi tahun 2025 sebesar Rp. 26,640,000 sedangkan realisasi mencapai Rp. 26,500,000 (realisasi 99.47%).

BRMP DIY sebagai lembaga publik memahami peran dan tugasnya untuk memberikan pelayanan terbaik dan menyampaikan informasi publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengawali tahun anggaran baru, BRMP DIY telah melaksanakan penandatanganan maklumat pelayanan dan juga komitmen keterbukaan informasi publik. Penandatanganan maklumat pelayanan dan komitmen keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Kepala Balai, Kasubbag Tata Usaha dan para Katimker di hadapan seluruh karyawan karyawan BRMP DIY.

Upaya peningkatan dan perbaikan sarana prasarana terus ditingkatkan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dilaksanakan pembuatan aplikasi **Si-Mam (Aplikasi Informasi Terpadu Agromodern)**, sebuah aplikasi layanan terpadu tanpa login yang dapat digunakan untuk melacak kebutuhan layanan sesuai dengan kebutuhan stakeholders. Selain itu, anggaran juga dikelola untuk meningkatkan sarana prasarana yang mendukung kebutuhan para stakeholders dalam memperoleh informasi publik secara mudah, cepat dan transparan.

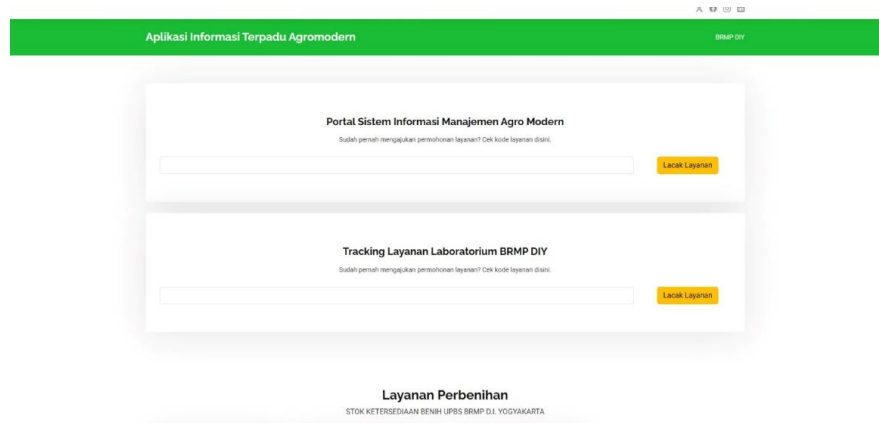
Sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi publik, BRMP DIY telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan menghadirkan para stakeholders. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Balai menyampaikan seluruh layanan yang tersedia di BRMP DIY dan menerima seluruh masukan dan saran perbaikan dari peserta FKP. Pada akhir kegiatan FKP, telah ditandatangani nota kesepahaman antara Kepala Balai dengan perwakilan stakeholders sebagai wujud dan komitmen peningkatan layanan publik di tahun yang akan datang.

Untuk meningkatkan kualitas pemenuhan evidence dan penilaian SAQ, BRMP DIY menerima kunjungan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi penilaian tahun sebelumnya guna adanya peningkatan dan perbaikan evidence pada tahun berjalan sehingga nilai dapat lebih meningkat dan predikat informatif tetap dapat dipertahankan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : 5530/Kpts/HM.130/A/12/2025, BRMP DIY berhasil mempertahankan predikat informatif dan menduduki peringkat ke-10 untuk pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 kategori Eselon III. Prestasi tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan standar pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada waktu mendatang.



Penandatanganan Maklumat Pelayanan dan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik



Aplikasi Informasi Terpadu Agromodern (Si-Mam)



Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Oleh PPID Kementan



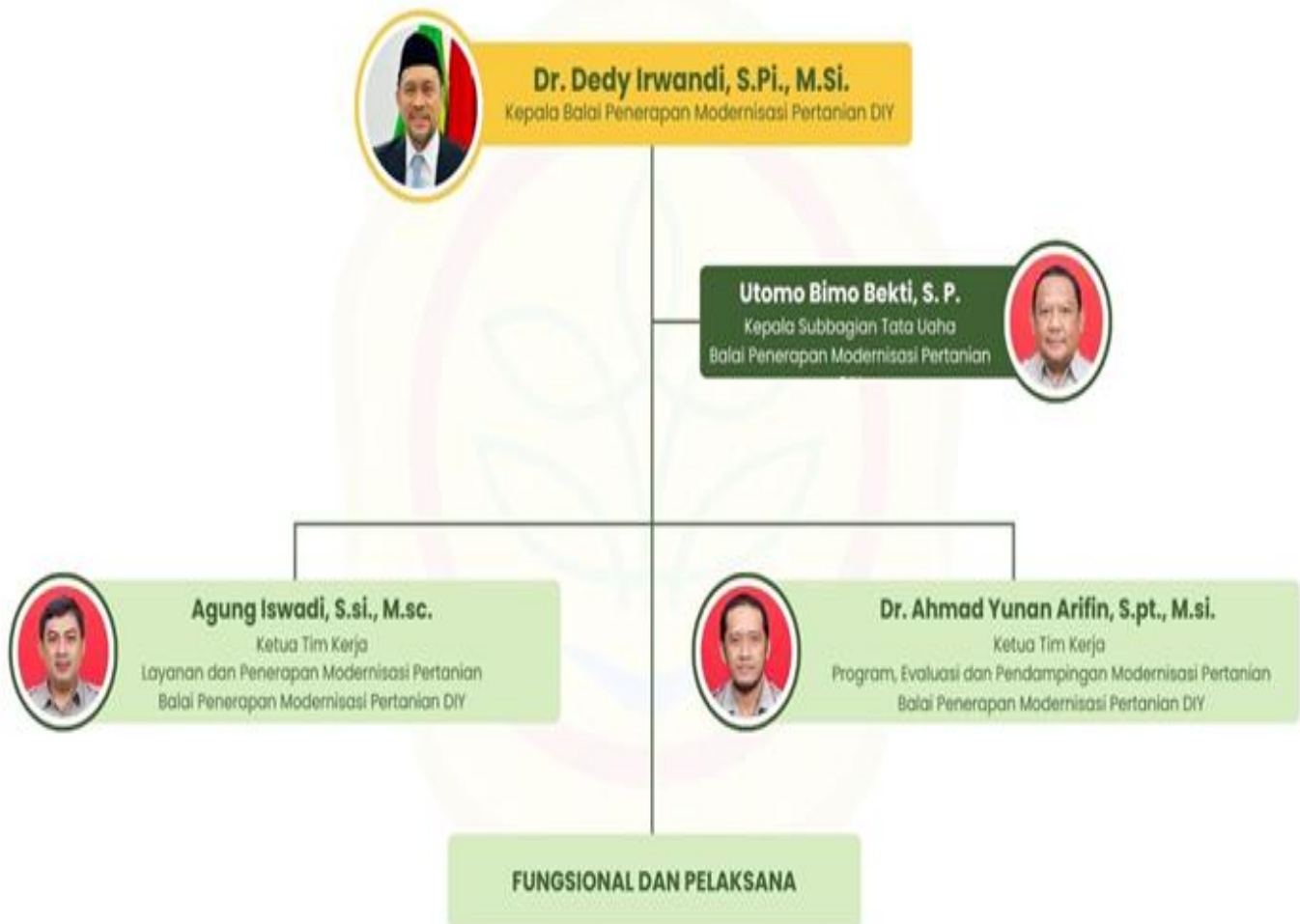
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I. YOGYAKARTA

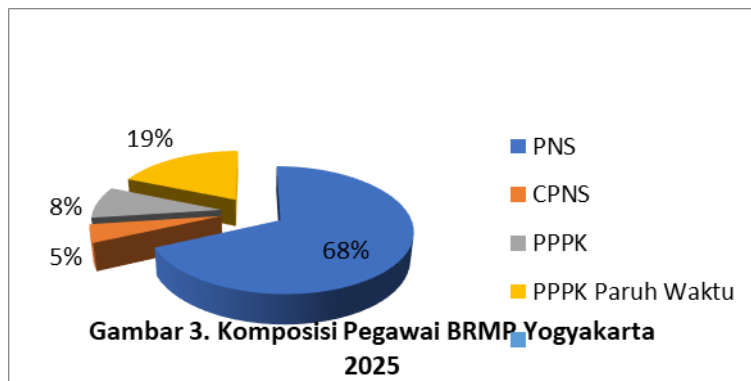


LAMPIRAN SDM

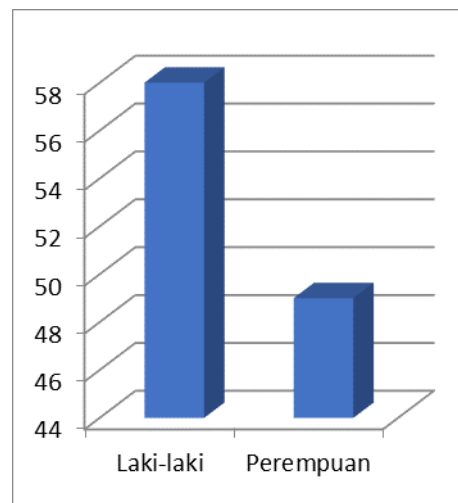
SUMBERDAYA MANUSIA

2.1. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2025, BRMP didukung oleh 107 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri atas 73 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 9 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 20 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Keragaan distribusi pegawai berdasarkan status kepegawaian disajikan pada Gambar 3.



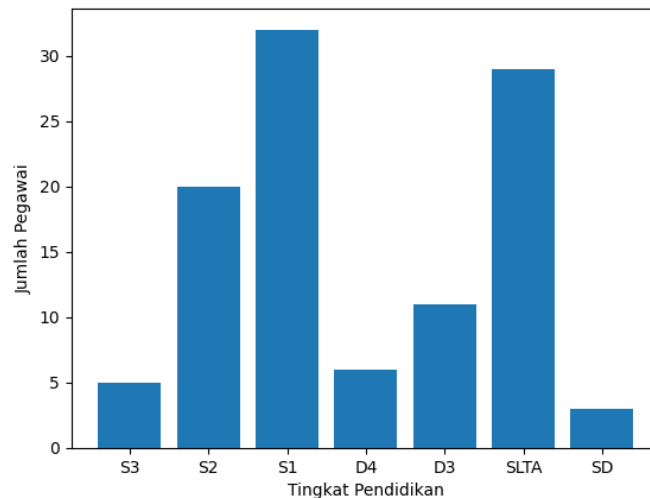
Berdasarkan jenis kelamin, pegawai laki-laki berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang dan pegawai berjenis kelamin perempuan berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang.



Gambar 4. Distribusi Pegawai berdasar jenis kelamin

Selain itu, untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang komposisi dan distribusi sumberdaya pengkajian di BRMP Yogyakarta, maka data sumber daya manusia disusun dan dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria.

Berdasarkan tingkat pendidikan, kualifikasi pegawai BRMP Yogyakarta berasal dari latar belakang yang beragam sebagaimana disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Distribusi Pegawai berdasar tingkat pendidikan

Kualifikasi ASN yang mendukung kegiatan di BRMP Yogyakarta berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam. Jumlah pegawai dengan pendidikan akhir S3 sebanyak 5 orang, S2 sebanyak 20 orang, S1 sebanyak 32 orang, D4 sebanyak 6 orang, D3 sebanyak 11 orang, SLTA sebanyak 28 orang, dan SD sebanyak 3 orang.

2.2. Distribusi SDM Menurut Jabatan

Sesuai dengan struktur organisasi, BRMP Yogyakarta memiliki 2 pejabat struktural, 56 pejabat fungsional, dan 49 pegawai dengan jabatan pelaksana.

Pejabat fungsional di BRMP Yogyakarta terdiri atas **dua kelompok jabatan**, yaitu **jabatan fungsional keahlian** dan **jabatan fungsional keterampilan**. Sebaran jumlah pejabat fungsional pada kelompok **keahlian** dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Distribusi Pejabat Fungsional Keahlian

Nama Jabatan	Utama	Madya	Muda	Pertama	Jumlah
Analisis Pengelola Keuangan APBN	–	–	1	2	3
Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	–	2	4	–	6
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	–	–	–	1	1
Arsiparis	–	–	1	–	1
Dokter Hewan Karantina	–	–	1	–	1
Medik Veteriner	–	–	1	–	1
Pengawas Bibit Ternak	–	–	1	–	1
Pengawas Mutu Hasil Pertanian	–	1	4	4	9
Penyuluh Pertanian	2	3	3	3	11
Pustakawan	–	–	1	–	1
Perencana	–	–	–	1	1
Pranata Hubungan Masyarakat	–	–	–	1	1
Pranata Komputer	–	–	–	1	1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	–	–	1	–	1
Analisis Perkarantina Tumbuhan	–	–	1	1	2
Calon Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	–	–	–	1	1
Calon Analisis Standardisasi	–	–	–	4	4
Jumlah	2	6	19	19	46

Sebaran jumlah pejabat fungsional pada kelompok keterampilan dapat terlihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Pejabat Fungsional Keterampilan

Nama Jabatan	Penyelia	Mahir	Terampil	Pemula	Jumlah
Arsiparis	–	1	1	–	2
Paramedik Karantina Hewan	–	–	2	–	2
Pengawas Benih Tanaman	–	–	2	–	2
Pengawas Mutu Pakan	1	–	1	–	2
Pranata Keuangan APBN	–	1	–	–	1
Pustakawan	1	–	–	–	1
Jumlah	2	2	8	–	10

Berdasarkan tabel 1, jumlah pejabat fungsional di jenjang keahlian adalah 46 orang dengan jumlah pejabat terbanyak ada pada jabatan Penyuluh Pertanian. Selanjutnya pada tabel 2, jumlah pejabat fungsional di kelompok keterampilan adalah 12 orang dan tersebar secara merata pada 6 jabatan sebagaimana tercantum.

2.3. Perkembangan Tugas Belajar

Hingga akhir Tahun 2025, tidak terdapat pegawai BRMP Yogyakarta yang sedang menjalankan tugas belajar. Pegawai yang sebelumnya menjalani tugas belajar S2 dan S3 telah menyelesaikan pendidikan dan kembali aktif bekerja pada bulan Agustus dan September 2025.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA AWAL



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN D.I. YOGYAKARTA
 Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.
 Telepon : (0274) 884662, 4477053, Fax : (0274) 4477052, WEBSITE : yogyakarta.bsip.pertanian.go.id
 email : bsp.yogyakarta@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Soeharsono

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama


 Fadry Djufry


 Soeharsono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN YOGYAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta (Nilai)	85

57

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	194.693.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	194.693.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	-
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	-
	Program Dukungan Manajemen	Rp	9.674.215.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	9.674.215.000

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	-	Ton
		Produksi Benih Jagung	-	Ton

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	-	Ton
		Produksi Benih Jagung	-	Ton
		TOTAL		

Perjanjian Kinerja Akhir



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN D.I. YOGYAKARTA
Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.
 Telepon : (0274) 884662, WEBSITE : diy.bmp.pertanian.go.id
 email : bmp.diy@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Soeharsono
 Jabatan : Plt Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I.Yogyakarta
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
 Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry

Plt Soeharsono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
		UTAMA			
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1.	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1.	Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	Teknologi
		2.2.	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	-	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1.	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern	-	Orang
		LAINNYA			
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1.	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I Yogyakarta	83.88	Nilai (0-100)
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I Yogyakarta	91.55	Nilai (0-100)

Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
EC	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 315.389.000
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp 315.389.000
HA	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 0
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 0
WA	Dukungan Manajemen	Rp 11.299.760.000
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 11.299.760.000
		Rp 11.615.149.000

Total Anggaran Terblokir Senilai : 568.500.000 Terdiri dari
- Program dukungan Manajemen Rp 568.500.000

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Fadjry Djufry

Plt Soeharsono

MANUAL IKI

MANUAL IKU BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian
Kode IKSK	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (1)
Definisi	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian pada tahun berjalan dari kegiatan perbenihan, pendampingan standar, I care dan pendampingan program strategis
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Dokumen
Formula/Cara menghitung	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian pada tahun berjalan melalui dokumen kegiatan produksi benih sumber spesifik lokasi, ICARE dan Lembaga Penerap Standar yang didampingi
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Penanggungjawab Kegiatan
Cara pengambilan data	Menghitung jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian pada tahun berjalan melalui dokumen kegiatan produksi benih sumber spesifik lokasi, ICARE dan Lembaga Penerap Standar yang didampingi
Catatan khusus	Menghitung seluruh jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan, tidak dibatasi oleh komoditas.
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

MANUAL IKU BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (unit)
Definisi	Benih/Bibit Spesifik Lokasi adalah benih atau bibit yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kesesuaian dengan kondisi agroekosistem di suatu wilayah.
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Dokumen
Formula/Cara menghitung	Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Penanggungjawab Kegiatan
Cara pengambilan data	Menghitung Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan
Catatan khusus	- Total benih yang dihitung adalah benih tersertifikasi - Jika benih tahun berjalan belum tersertifikasi dapat menggunakan data potensi benih yang akan tersertifikasi - Satuan unit yang dimaksud untuk produksi benih adalah ton
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

MANUAL IKU BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Tenwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I Yogyakarta: (80)
Definisi	Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal
Formula/Cara menghitung	- Untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PHPRB Inspektorat Jenderal - Untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil survey Tim Penilai PMPRB BRMP
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Tim Inspektorat Jenderal dan Tim Penilai BRMP
Cara pengambilan data	Melalui pemeriksaan dan survey Tim Penilai PHPRB Ijen dan Tim Penilai BBPPMP ke Satker
Catatan khusus	Perhitungan nilai ZI menuju WBK/WBBM mengacu pada Penetapan RB nomor 90 tahun 2021. Penetapan WBK - Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; - memiliki nilai komponen hasil "Tenwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen Kinerja Lebih Baik minimal 2,5; - Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00 Penetapan WBBM - Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85; - memiliki nilai komponen hasil "Tenwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 19,50 dengan nilai sub



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

D.I. YOGYAKARTA

Nomor : 3618/Kpts/RC.210/H.12.14/06/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PROGRAM DAN MONITORING EVALUASI

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN D.I. YOGYAKARTA

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

D.I. YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I Yogyakarta sesuai Visi dan Misi Balai, dipandang perlu membentuk Tim Program dan Monitoring Evaluasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I. Yogyakarta;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan menjalankan tugas sebagai tim program dan monitoring evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 09 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian di Bidang Organisasi dan Kepegawaian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Program dan Monitoring Evaluasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I. Yogyakarta dengan susunan seperti pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Program dan Monitoring Evaluasi bertugas untuk :

1. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan, landasan, arah, dan strategi program kegiatan sesuai dengan mandat balai;
2. Menyelaraskan keterkaitan kebijakan program pembangunan dan penerapan modernisasi pertanian di tingkat pusat dan menyelaraskan keterkaitan antar program yang ada di tingkat Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I. Yogyakarta dengan stakeholder di tingkat daerah, meliputi dinas-dinas teknis, perguruan tinggi dan pemerintah daerah;
3. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan prioritas program penerapan modernisasi pertanian secara periodik, baik yang dibiayai dengan dana APBN, APBD, Loan atau kerjasama dengan pihak lain;
4. Merencanakan dan menyusun program penerapan serta diseminasi modernisasi pertanian sesuai kebutuhan wilayah Yogyakarta dalam bentuk matrik;
5. Mencermati, menginventarisir, menilai dan menentukan output unggulan kegiatan pengkajian;

6. Menginventarisir dan melaksanakan penajaman judul dan output kegiatan;
7. Mengkoordinasikan kegiatan evaluasi kelayakan usulan kegiatan dan alokasi anggarannya baik yang bersumber dari APBN, APBD, Loan atau kemitraan;
8. Mengkoordinasikan operasionalisasi kegiatan lintas Jabatan Fungsional;
9. Melaksanakan pembahasan program penerapan dan diseminasi modernisasi pertanian bersama instansi terkait;
10. Menyusun usulan baku biaya dan perhitungan anggaran pembangunan;
11. Menyusun perencanaan anggaran dalam bentuk RKA-KL dan DIPA Balai.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Program dan Monitoring Evaluasi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan Tim Program dan Monitoring Evaluasi dibebankan pada Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I. Yogyakarta.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 13 Juni 2025

Kepala,



Dr. Dedy Irwandi, S.Pi., M.Si.

NIP 197206051998031003

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I
Yogyakarta

Nomor : 3618/Kpts/RC.210/H.12.14/06/2025

Tanggal : 13 Juni 2025

**PERSONIL TIM PROGRAM DAN MONITORING EVALUASI
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN D.I YOGYAKARTA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	JABATAN TIM
1	2	3	4
1	Dr. Dedy Irwandi, S.Pi., M.Si NIP 197206051998031003	Kepala Balai	Penanggungjawab Program dan Evaluasi
2	Dr. Ahmad Yunan Arifin, M.Si NIP 197804242008011009	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pendampingan Modernisasi Pertanian	Ketua Tim Kerja Program dan Monitoring Evaluasi
3	Eko Srihartanto, SP, M.Sc NIP. 198105192009011001	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	Sekretaris Program dan Monitoring Evaluasi
4.	Eko Sutardi, SE NIP 198302162011011001	Perencana Ahli Pertama	Staff Pelaksana Urusan Monitoring dan Evaluasi

5.	Sukarmi, SE NIP 198101072009122005	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Perencanaan Penganggaran
6.	Agung Ariyanto SEI., M.Ec. Dev. NIP 198101312009121004	PPK	Anggota
7.	Utomo Bimo Bekti, SP NIP 197606072009011006	Kasubag Tata Usaha	Anggota
8.	Agung Iswadi, S.Si., M.Sc NIP 198003272009101001	Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Anggota
9.	Dr. Ir. Umi Pudjiastuti, MP. NIP. 196105311990032001	Koordinator Penyuluh	Anggota
10.	drh. Anastasia Sischa Jati U, M.Sc. NIP 198106122006042001	Medik Veteriner Ahli Muda	Anggota
11.	Dr. Rudi Hartono, SP., MP. NIP. 197304301999031001	Koordinator Penerapan	Anggota

LAMPIRAN SOP

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	/OT.210/H.12.14/06/2025
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2025
	Disahkan oleh	Kepala,
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN D.I YOGYAKARTA		
		Dr. Ir. Dedy Irwandi, S.Pi., M.Si NIP. 197206051998031003
	Nama SOP	PENYUSUNAN LAKIN
Dasar Hukum		
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2. Peraturan Menteri Pertanian No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian No.02 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian 4. PERPRES No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah		
Kualifikasi pelaksana		
- Memiliki kemampuan manajemen organisasi - Memiliki kemampuan mengkomunikasikan rencana kegiatan teknis		
Keterkaitan		
- SOP Pelaksanaan kegiatan - SOP Seminar Hasil Kegiatan		
Peralatan/perlengkapan		
- Panduan Penyusunan LAKIN - Proposal kegiatan teknis - RKA-KL/DIPA - Renstra - Laporan kegiatan - ATK, Komputer dan printer		
Peringatan		
Jika tidak menyusun LAKIP/LAKIN tidak ada laporan pertanggung jawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh BRMP Yogyakarta dan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian serta melanggar PERPRES No. 29 Tahun 2014		
Pencatatan dan pendataan		
- Data dan informasi tentang pencapaian fisik dan keuangan BRMP Yogyakarta - Data dan informasi pencapaian indikator kinerja		

PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket.
		PJ Penyusunan LAKIP	Tim Kerja Diseminasi	PJ Kegiatan DIPA	Ka BRMP Yogyakarta	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan TOR penyusunan LAKIN beserta surat permintaan bahan LAKIN					Berkas	1 hari	Berkas	
2	Memeriksa dan memaraf surat permintaan bahan LAKIN					Berkas	1 Jam	Berkas	
3	Memeriksa dan menandatangani persetujuan surat permohonan bahan LAKIN					Surat	1 Jam	Surat	
4	Menerima surat permintaan bahan LAKIN untuk didistribusikan ke Penanggungjawab Kegiatan					Surat	1 hari	Surat	
5	Menerima surat permintaan dan mengumpulkan bahan LAKIN					Surat	4 hari	Surat	
6	Menerima bahan untuk penyusunan LAKIN					Berkas	1 hari	Berkas	
7	Melakukan rekapitulasi, pengolahan, analisis data, dan penyusunan draft LAKIN					Berkas	5 hari	Berkas	
8	Melakukan penyusunan draft LAKIP					Berkas	5 hari	Berkas	
9	Memeriksa dan menyempurnakan draft LAKIN					Berkas	2 hari	Berkas	
10	Menjilid dan menggandakan LAKIN					Berkas	1 hari	Berkas	
11	Mengirimkan LAKIN ke Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dan mendokumentasi LAKIN					Berkas dan surat	1 hari	Surat	